

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2012/PN.BR)



OLEH:

FAISAL HUSSEINI ASIKIN

B111 09 298

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2012/PN.BR)**

OLEH:

FAISAL HUSSEINI ASIKIN

B111 09 298

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Serjana dalam Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2012/PN.BR)

Disusun dan diajukan oleh

FAISAL HUSSEINI ASIKIN

B 111 09 298

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Selasa Tanggal 19 Februari 2013
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H.
NIP. 196207111987031001

Hijrah Adhyanti M, S.H., M.H.
NIP. 197903262008122002

**A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik**

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 1989031 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Faisal Hussein Asikin
Nomor Induk : B 111 09 298
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak
Pidana Pembunuhan Berencana Yang
Dilakukan Oleh Anak.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar, Januari 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H.,M.H.
NIP. 196207111987031001

Hj. Nur Azisa, S.H.,M.H.
NIP. 1967101019922002

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : Faisal Husseini Asikin
Nomor Induk : B 111 09 298
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh
Anak.

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian
akhir Program Studi.

Makassar, Februari 2012

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H.
NIP. 19630419 198903 003

ABSTRAK

Faisal Hussein Asikin (B111 09 298), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan dalam Perkara Pidana Nomor 40/Pid.Sus/2012/PN.BR), dibawah Bimbingan Bapak **H.M. Said Karim**, Sebagai Pembimbing I dan Ibu **Hj. Nur Azisa**, Sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 40/Pid.Sus/2012/PN.BR. dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pidana dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 40/Pid.Sus/2012/PN.BR.

Penelitian ini dilakukan di Kota Barru dengan lokasi Pengadilan Negeri Barru. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif, tehnik analisis data secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 40/Pid.Sus/2012/PN.BR. dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pidana dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor.40/Pid.Sus/2012/PN.BR.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus pembunuhan berencana ini yakni pasal 340 KUHP telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, Hanya saja Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut untuk sebagian telah sesuai dengan teori hukum pidana namun untuk bagian lainnya masih terdapat kelemahan yaitu dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi para terdakwa, tidak lazim dalam suatu putusan tidak mencantumkan pertimbangan menyangkut hal-hal yang meringankan terdakwa, dimana dalam perkara ini hanya hal-hal yang memberatkan yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Selain itu pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara pidana tersebut cukup berat mengingat terdakwanya adalah anak. akan lebih baik jika hakim menjatuhkan pidana sedikit lebih ringan disertai dengan lebih menekankan pada pemberian bimbingan atau pembinaan dan pelatihan sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai panutan seluruh muslim di dunia ini.

Penulis sebagaimana manusia biasa tentunya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan serta keterbatasan akan pengetahuan, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini, baik materi, teknis maupun penyusunan kata-katanya belum sempurna sebagaimana diharapkan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda **H. Muh. Asikin, S.H.** dan Ibunda **Hj. St. Karrama, S.pd**
beserta saudari-saudariku **Musyarrafah Asikin, S.H. Fadillah**

Asikin dan **Nur Latifah Asikin** yang tak henti-hentinya memberi dukungan dan motivasi agar penyelesaian penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

2. Bapak **Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi SpBo** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Pembantu Rektor.
3. Bapak **Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak **Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H** dan Ibu **Hj. Nur Azisa, S.H., M.H** selaku Pembimbing I dan Pembimbing II atas segala masukan, bantuan, serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
5. Bapak **Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H** selaku penguji I, Ibu **Hj. Haeranah, S.H., M.H** selaku penguji II, dan Ibu **Dara Indrawati, S.H., M.H** selaku penguji III.
6. Seluruh dosen serta para karyawan dan petugas akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.
7. Bapak **Alimin Ribut Sujono, S.H., M.H.** selaku Ketua Pengadilan Negeri Barru dan seluruh Staf Pengadilan Negeri Barru yang telah membantu saya dalam menyempurnakan kelengkapan data.
8. Para Sensei, Senpai, dan Kohai yang telah mengajarkan saya akan makna bushido sesungguhnya selama keanggotaan dan masa jabatan saya sebagai kordinator kerohanian **UKM Karate-Do**

Gojukai Indonesia Fak. Hukum UNHAS pada periode 2011-2012 yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu.

9. Rekan-rekan yang telah membantu saya dalam memahami arti tanggung jawab yang sebenarnya selama keanggotaan dan masa jabatan saya sebagai ketua umum Kema Barru Unhas Pada Periode 2012-2013.
10. Rekan-rekan di BEM dan DPM serta UKM-UKM yakni ALSA, LP2KI, MPM As-Syariah, CAREFA, Sepak Bola, Pers Mahasiswa, BSDK, Perca Unhas dan Basket.
11. Teman-teman seperjuanganku dalam **DOKTRIN '09** yakni: Fauzan, Asdar, Bayu, Isak, Ardi, Evy, Edwin, Ipul, Roxcy, Wandu, Ilham, Mahsyar, Rudi, Fadlan, Afif, Iman, Indra, Imam, Arif, Firman, Ibnu, Izhar, Chua, Ike', Nia, Wira, Indah, Randi, Agung, Adam, Aslan, Arul, Farel, Affir, Danu, Fadil, Alif, Adi, Unirsal, Eli, Putra, Gp, Ridwan, Aulia, Hera, Magfirah, Ikhsan, Dathe, Dede, Uya, Fadel, Hanan, Ardillah, Wahyu, Halil, Gideon, Upi, Aan, Bintang, Dady, Fikar, Apri, Andika, Udin, Cybon, Ekha, Firman, Ardi, Nova, Rathy, Ima, Rian, Saddank, Sonda, Ventus, Rijal, Satri, Fadli dll
12. Senior-senior Ekstradisi '07, dan Notaris '08, serta junior-junior Legitimasi '10, dan Mediasi '11.
13. Bapak **Hafiuddin**, S.Pt selaku Kepala Desa Ujung Tanah Kec. Bola Kab. Wajo beserta teman-teman seposko: **Nur Hamiola, Nur Laila Didipu, Ika Setiadi, Kappyanti, A. Baso Magngoni, Wahyu**

dan Edwin Damil Permana yang telah banyak mengajarkan saya makna akan pengabdian terhadap masyarakat selama proses Kuliah Kerja Nyata Universitas Hasanuddin Gelombang 82.

14. Tidak lupa pula ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada adinda Ayu Anugerah yang selalu memberikan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini
15. Dan seluruh civitas akademika yang turut serta membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, kritik dan saran juga masih diperlukan namun tetap berharap mampu memberikan manfaat bagi dunia keilmuan dan kepada semua yang sempat membaca skripsi ini pada umumnya.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Februari 2013

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	8

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana.....	8
1. Pengertian Tindak Pidana	9
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	14
3. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana	25
B. Tindak Pidana Pembunuhan.....	31
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	31
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan	32
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan	36

4. Pembunuhan Berencana	39
C. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	40
1. Pengertian Anak	40
2. Sebab Timbulnya Kenakalan Anak.....	44
3. Pertimbangan Pidana Anak	44
4. Jenis Pidana dan Tindakan terhadap Anak	47
 III. METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	52
B. Jenis dan Sumber Data	52
C. Tehnik Pengumpulan Data	53
D. Analisis Data	53
 IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.	54
B. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.....	80
 V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	115

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara wajib “menjunjung hukum”. Dalam kenyataan sehari-hari, warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut “melanggar hukum” karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.¹

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain,² sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik).

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat

¹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 22

² Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Cetakan Kesepuluh, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 3

terkutuk dan tidak berperikemanusiaan. Dipandang dari sudut agama, pembunuhan merupakan suatu yang terlarang bahkan tidak boleh dilakukan.

Didalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Dan perampasan itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”

Apabila kita melihat ke dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP, segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.³

Salah satu masalah yang sering muncul dimasyarakat adalah tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan dalam jiwa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat-istiadat, sekaligus bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup.

³ P.A.F., Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 11

Beberapa tahun belakangan ini juga terjadi fenomena-fenomena sosial yang muncul di dalam masyarakat, dimana kejahatan-kejahatan tindak pidana pembunuhan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak-anak baik secara sendi-sendiri, maupun secara bersama-sama.

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut akan dilakukan tindakan hukum atau proses hukum. Dalam tindakan hukum tersebut, yang masih anak-anak lebih didepankan pada aspek perlindungan hak-hak anak tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaannya.

Hal ini didasarkan karena dalam diri seorang anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak anak sebagaimana layaknya manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak sebagai salah satu sumber daya manusia merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus terutama anak yang berperkara dengan hukum.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi diri sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi

kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.⁴

Jika harus dilakukan proses hukum terhadap anak maka tentunya kurang adil jika kepada terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil jika pidana yang harus dijalani sama dengan pidana terdakwa dewasa. Apalagi mengingat bahwa anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga dalam menanganani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus betul-betul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak.

Pertanggungjawaban pidana anak tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada hukum materiil seperti yang diatur dalam KUHP, karena KUHP tersebut ketentuan hukumnya bersifat konvensional yang mengacu kepada kepentingan hukum kolonial Belanda, tetapi juga karena perilaku dan perdaban manusia sudah sedemikian kompleks bahkan perkembangannya jauh lebih cepat dari peraturan yang ada.⁵

Oleh karena itu, melalui Pasal 103 KUHP, masih dibenarkan adanya perbuatan lain yang menurut undang-undang selain KUHP dapat dipidana sepanjang undang-undang itu bertalian dengan masalah anak

⁴ Maidin Gultom, *perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010, hlm 39.

⁵ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung, P.T.Alumni, 2010, hlm 49.

dan tidak bertentangan dengan ketentuan KUHP (*lex specialis derogat legi generali*).

Melalui asas ini pula hukum pidana anak membenarkan undang-undang lain, di luar KUHP yang bertalian dengan masalah anak seperti Ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, di dalam undang-undang ini mengatur perbedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pembedanaannya.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁶

Berkaitan dengan hal tersebut di atas yang dalam kenyataan hakim dalam menjatuhkan putusan kadang-kadang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya dapat merugikan bagi diri si pelaku, terutama dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai generasi

⁶ Wigiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan ketiga, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm 29.

penerus bangsa, dalam konteksnya sering dianggap tidak adil bagi anak.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum dan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul: **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 40/pid.sus/2012/PN.BR).**

2. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam putusan No.40/pid.sus/2012/PN.BR?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak?

3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan penulisan yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pembunuhan dalam putusan No.40/pid.sus/2012/PN.BR.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

Sementara kegunaan penulisan yaitu :

1. Memberikan wawasan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak.
2. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.
3. Sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”⁷

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-

⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta, P.T.Rineka Cipta, 2007, hlm 92.

undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.⁸

Penulis akan memaparkan beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut beberapa pakar antara lain:

Strafbaarfeit dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai:

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”⁹

Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung *strafbaarfeit* sebagai berikut.

“*strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”¹⁰

Sementara Jonkers merumuskan bahwa

“*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang

⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012 Hlm 20.

⁹ P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung, P.T.Citra Aditya Bakti, 2011, hlm 182.

¹⁰ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 8.

berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.’¹¹

Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu sebagai berikut:

“Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.”¹²

S.R. Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai berikut:¹³

“Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).”¹⁴

Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut:

“Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.”¹⁵

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

a) Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;

¹¹ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm 20.

¹² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, Jakarta, P.T.Rienka Cipta, 2010, hlm 96.

¹³ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm 22.

¹⁴ *Ibid*, hlm 25

¹⁵ *Ibid*.

- b) Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c) Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
- d) Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;
- e) Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).¹⁶

Jonkers dan Utrecht berpendapat rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi:

- a) diancam dengan pidana oleh hukum;
- b) bertentangan dengan hukum;
- c) dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d) orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.¹⁷

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a) Suatu perbuatan manusia;

¹⁶ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm 231-232

¹⁷ Andi Hamzah, *Loc.Cit.*

- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸

Dalam KUHP sendiri, tindak Pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku III dan Buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan.

Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.

a) Ada Perbuatan

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan manusia (*actus reus*) terdiri atas:

- 1) (*commision/act*) yang dapat diartikan sebagai melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh undang-undang atau sebagai pakar juga menyebutnya sebagai perbuatan (*aktif/positif*).

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta, P.T. Raja Grafindo, 2011, hlm 48

2) (*ommision*), yang dapat diartikan sebagai tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh undang-undang atau sebagian pakar juga menyebutnya perbuatan (*pasif/negatif*).

Pada dasarnya bukan hanya berbuat (*commisio/act*) orang dapat diancam pidana melainkan (*ommision*) juga dapat diancam pidana, karena *commisio/act* maupun *ommision* merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Untuk lebih jelasnya baik *commisio/act* maupun *ommision* akan penulis perlihatkan perbedaannya, hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal yang terkait yang terdapat dalam KUHP, antara lain sebagai berikut:

Ommision/act, yang sebagian pakar menyebutnya sebagai perbuatan aktif atau perbuatan positif, contohnya terdapat pada Pasal 362 KUHP yang rumusannya antara lain:

“barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900”¹⁹

ommision, yang sebagian pakar sebut sebagai perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan yang contohnya terdapat pada Pasal 165 KUHP yang rumusannya antara lain:

¹⁹ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politea, 1995, hlm 249

“barang siapa yang mengetahui ada orang yang bermaksud hendak melakukan suatu pembunuhan dan dengan sengaja tidak memberitahukan hal itu dengan sepatutnya dan waktunya baik kepada yang terancam, jika kejadian itu benar terjadi dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500”²⁰

b) Ada Sifat Melawan Hukum

Penyebutan “sifat melawan hukum” dalam pasal-pasal tertentu menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari “melawan hukum” ini yaitu diartikan:

Ke-1 : bertentangan dengan hukum (objektif);

Ke-2 : bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain;

Ke-3 : Tanpa hak.²¹

Lamintang menjelaskan sifat melawan hukum sebagai berikut:

“menurut ajaran *Wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *Wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur delik yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *Wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *Wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan harus ditinjau dari ketentuan hukum yang tertulis melainkan harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.”²²

²⁰ *Ibid*, hlm 141.

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia*, Cetakan Ketiga, Bandung, Refka Aditama, 2010, hlm 2.

²² P.A.F.Lamintang, *Op.Cit*, hlm 445.

Melihat uraian defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam yakni:

1) Sifat melawan hukum formil (*formale wedderrechtelijk*).

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.²³

2) Sifat melawan hukum materill (*materiel wedderrchtelijk*).

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tatapi juga meliputi hukum yang tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan yang berlaku di masyarakat.²⁴

Untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan hukum

²³ Amir Ilyas, *Op.Cit.* hlm 53

²⁴ *Ibid.*

(*wederrechtelijk*) baik secara *eksplisit* maupun *emplisit* ada dalam suatu pasal. Meskipun adanya sifat melawan hukum yang *eksplisit* maupun *emplisit* dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak dapat disangsikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar si pelaku atau si terdakawa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian didepan pengadilan.²⁵

Adanya sifat melawan hukum yang dicantumkan dalam ketentuan perundang-undangan, hal ini disebabkan karena perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu dicantumkan secara eksplisit, misalnya pada Pasal 338 KUHP tidak mengandung kata melawan hukum, namun setiap orang normal memandang bahwa menghilangkan nyawa orang lain adalah melawan hukum, bertentangan tidak saja dengan hukum, tetapi semua kaidah-kaidah sosial dan agama.²⁶

Tidak semua perumusan tindak pidana dalam KUHP memuat rumusan melawan hukum. hal ini dapat dilihat antara lain, dalam pasal-pasal berikut ini:

1) Pasal 167 KUHP, yang berbunyi antara lain sebagai berikut:

“barangsiapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau

²⁵ Teguh Prasetyo, *Op.cit.* hlm 69

²⁶ Zainal Abidin Farid, *Op.Cit*, hlm 240.

pekarangan yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.”²⁷

2) Pasal 333, yang berbunyi antara lain sebagai berikut:

“(1) barangsiapa dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang atau dengan meneruskan tahanan itu dengan melawan hak dihukum penjara selama-lamanya delapan tahun.”²⁸

3) Pasal 406, yang berbunyi antara lain sebagai berikut:

“(1) barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi dipakai atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.”²⁹

Dalam ketiga pasal di atas, dirumuskan dengan jelas unsur melawan hukum, akan tetapi ada juga pasal dalam KUHP yang tidak memuat unsur melawan hukum dalam rumusan tindak pidana, antara lain:

1) Pasal 281 KUHP, yang menentukan bahwa antara lain sebagai berikut:

“dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah”.

“(1) barang siapa dengan sengaja merusak kesusilan di depan umum”.³⁰

²⁷ R Soesilo, Op.Cit, hlm 143

²⁸ *Ibid*, hlm 237

²⁹ *Ibid*, hlm 278

³⁰ *Ibid*, hlm 204

2) Pasal 351 KUHP, yang berbunyi antara lain sebagai berikut:

“(1) penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp 4.500”³¹

Dalam beberapa pasal tidak disebutkan unsur melawan hukum dikarenakan para pembentuk undang-undang menganggap unsur tersebut sudah jelas jadi tidak perlu lagi dimuat dalam rumusan KUHP.

c) Tidak Ada Alasan Pembena

1) Daya Paksa *Absolute*

Sathochid Kartanegara mendefinisikan daya paksa *Absolute* sebagai berikut:

“Daya paksa *absolute* adalah paksaan yang pada umumnya dilakukan dengan kekuasaan tenaga manusia oleh orang lain.”³²

Daya paksa (*overmacht*), telah diatur oleh pembentuk undang-undang di dalam pasal 48 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Tidaklah dapat dihukum barang siapa telah melakukan suatu perbuatan dibawah pengaruh dari suatu keadaan yang memaksa”

Teks asli pasal tersebut yaitu:

“Niet strafbaar is hij die een feit begaat wartoc hij door overmacht is gedrongen”

³¹ *Ibid*, hlm 244

³² Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm 55

Daya paksa (*Overmacht*), dapat terjadi pada peristiwa-peristiwa berikut:

- a) Peristiwa-peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara fisik;
- b) Peristiwa-peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara psikis;
- c) Peristiwa-peristiwa dimana terdapat suatu keadaan yang biasanya disebut *Nothstand*, *Noodtoestand* atau sebagai *etat de necessite*, yaitu suatu keadaan di mana terdapat:
 - Suatu pertentangan antara kewajiban hukum yang satu dengan kewajiban hukum yang lain.
 - Suatu pertentangan antara suatu kewajiban hukum dengan suatu kepentingan hukum.
 - Suatu pertentangan antara kepentingan hukum yang satu dengan kepentingan hukum yang lain.³³

b) Pembelaan Terpaksa

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dirumuskan di dalam KUHP

Pasal 49 Ayat 1, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya, untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari serangan yang melawan hak atau mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.”³⁴

³³ P.A.F.Lamintang, *Op.Cit*, hlm 428

³⁴ R soesilo, *Op.Cot*, hlm 64

Para pakar pada umumnya, menetapkan syarat-syarat pokok pembelaan terpaksa yaitu:

1) Harus ada serangan

Menurut doktrin serangan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Serangan itu harus mengancam dan datang tiba-tiba;
- Serangan itu harus melawan hukum.

2) Terhadap serangan itu perlu diadakan pembelaan.

Menurut doktrin harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- Harus merupakan pembelaan terpaksa; (Dalam hal ini, tidak ada jalan lain yang memungkinkan untuk menghindarkan serangan itu).

3) Pembelaan itu dilakukan dengan serangan yang setimpal;

Hal ini dimaksudkan bahwa adanya keseimbangan kepentingan hukum yang dibela dengan kepentingan hukum yang dikorbankan.

4) Pembelaan harus dilakukan untuk membela diri sendiri atau orang lain, perikesopanan (kehormatan) diri atau orang lain, benda kepunyaan sendiri atau orang lain.³⁵

c) Menjalankan Ketentuan Undang-Undang

Pasal 50 KUHP menyatakan bahwa:

“barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan Perundang-undangan, tidak boleh dihukum.”³⁶

³⁵ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm 60-61

Melihat uraian di atas diperlukan pemahaman yang seksama tentang:

a) Pengertian peraturan perundang-undangan;

Dahulu *Hoge raad* menafsirkan undang-undang dalam arti sempit yaitu undang-undang saja, yang dibuat pemerintah bersama-sama DPR.

Hoge raad menafsirkan peraturan perundangan dalam *arrestnya* tanggal 26 juni 1899, W7303, sebagai berikut:

“peraturan perundang-undangan adalah setiap peraturan yang telah dibuat oleh kekuasaan yang berwenang untuk maksud tersebut menurut undang-undang.”

b) Melakukan perbuatan tertentu

Menurut Sathochid Kartanegara mengenai kewenangan adalah sebagai berikut:

“Walaupun cara pelaksanaan kewenangan undang-undang tidak diatur tegas dalam undang-undang, namun cara itu harus seimbang dan patut.”³⁷

c) Menjalankan Perintah Jabatan Yang Sah

Hal ini diatur dalam pasal 51 ayat 1 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiada boleh dihukum barang siapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang sah, yang diberikan oleh pembesar (penguasa), yang berhak untuk itu.”³⁸

³⁶ R soesilo, *Op.Cot*, hlm 66

³⁷ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm 68.

³⁸ R soesilo, *Op.Cot*, hlm 66.

Sathocid kartanegara mengutarakan bahwa:

“pelaksanaan perintah itu harus juga seimbang, patut dan tidak boleh melampaui batas-batas keputusan pemerintah.”³⁹

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang mejurus kepada ppidanaan pelaku dengan meksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.⁴⁰

Pertanggungjawaban pidana meliputi beberapa unsur yang diuraikan sebagai berikut:

a) Mampu Bertanggung jawab

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, yang diatur yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti isi Pasal 44 KUHP antara lain berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur-unsur mampu bertanggungjawab mecakup:

1) Keadaan jiwanya:

³⁹ Leden Marpaung, *Loc.Cit.*

⁴⁰ Amir Ilyas, *Op.Cit*, 73.

- Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporal*);
- Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gaul, idiot, imbecile*, dan sebagainya); dan
- Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (*reflexe beweging*), melindur (*slaapwandel*), mengigau karena demam (*koorts*), nyidamdan dan lain sebagainya, dengan perkataan lain diadalam keadaan sadar.

2) Kemampuan jiwanya:

- Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.⁴¹

b) Kesalahan

Kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tidak tertulis dalam hukum positif indonesia yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan”, yang artinya, untuk dapat dipidananya seseorang diharuskan adanya kesalahan yang melekat pada diri seorang pembuat kesalahan untuk dapat diminta pertanggungjawaban atasnya.⁴²

⁴¹ Amir Ilyas, *Op.Cit.* hlm 76.

⁴² Teguh Prasetyo, *Op.cit.* hlm 226-227

Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau dolus dan kealpaan atau culpa, yang diuraikan lebih jelas sebagai berikut:

1) Kesengajaan (*Opzet*)

Menurut Criminal Wetboek Nederland tahun 1809 Pasal 11, sengaja (*Opzet*) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.⁴³

Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:⁴⁴

- kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)

Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku yang memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau yang dikehendaki atau yang dibayangkan ini tidak ada, ia tidak akan melakukan berbuat.⁴⁵

- kesengajaan dengan insaf pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*).

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat dasar dari

⁴³ Zainal Abidin Farid, *Op.Cit*, hlm 226

⁴⁴ Leden Marpaung, *Op.cit.*, hlm 9

⁴⁵ Teguh Prasetyo, *Op.cit.* hlm 98

delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu.⁴⁶

- kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan” bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.⁴⁷

2) Kealpaan (*Culpa*)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang disebabkan kurangnya sikap hati-hati karena kurang melihat kedepan, kealpaan ini sendiri di pandang lebih ringan daripada kesengajaan.

Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni⁴⁸

- kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld/culpa lata*).

Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, nyatanya timbul juga akibat tersebut.

⁴⁶ Amir Ilyas, *Op.Cit.* hlm 80

⁴⁷ Leden Marpaung, *Op.cit.*, hlm 18

⁴⁸ *Ibid.* hlm 26

- kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld/culpa levis*)

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang atau diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.⁴⁹

c) Tidak Ada Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsground* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responbility*, alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal.

Alasan ini dapat kita jumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan:

1) Daya Paksa Relatif

Dalam M.v.T daya paksa dilukiskan sebagai kekuatan, setiap daya paksa seseorang berada dalam posisi terjepit (*dwangpositie*). Daya paksa ini merupakan daya paksa *psikis* yang berasal dari luar diri si pelaku dan daya paksa tersebut lebih kuat dari padanya.⁵⁰

2) Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm 88-89.

Ada persamaan antara pembelaan terpaksa *noodwer* dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas *nodwer excès*, yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan, kesusilaan, dan harta benda baik diri sendiri maupun orang lain.

Perbedaannya ialah:

- Pada *noodwer*, si penyerang tidak boleh di tangani atau dipukul lebih daripada maksud pembelaan yang perlu, sedangkan *noodwer excès* pembuat melampaui batas-batas pembelaan darurat oleh karena keguncangan jiwa yang hebat.
- Pada *noodwer*, sifat melawan hukum perbuatan hilang, sedangkan pada *noodwer excès* perbuatan tetap melawan hukum, tetapi pembuatnya tidak dapat dipidana karena keguncangan jiwa yang hebat.
- Lebih lanjut pembelaan terpaksa yang melampaui batas *nodwer excès* menjadi dasar pemaaf, sedangkan pembelaan terpaksa (*noodwer*) merupakan dasar membenarkan, karena melawan hukumnya tidak ada.⁵¹

3) Perintah Jabatan Tidak Sah

⁵¹ Zainal Abidin Farid, *Op.Cit*, hlm 200-201

Perintah berasal dari penguasa yang tidak berwenang, namun pelaku menganggap bahwa perintah tersebut berasal dari penguasa yang berwenang, pelaku dapat dimaafkan jika pelaku melaksanakan perintah tersebut berdasarkan itikad baik, mengira bahwa perintah tersebut sah dan masih berada pada lingkungan pekerjaannya.⁵²

B. Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian

Para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau definisi tentang apa yang dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi banyak yang menggolongkan pembunuhan itu kedalam kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain.

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.⁵³

⁵² Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm 90

⁵³ P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 1

Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindakan pidana pembunuhan, jika akibat berbuat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Mengenai pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang bunyinya antara lain sebagai berikut:

“barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun .”⁵⁴

Dengan melihat rumusan pasal diatas kita dapat melihat unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:

a) Unsur *subyektif* dengan sengaja.

Pengertian dengan sengaja tidak terdapat dalam KUHP jadi harus dicari dalam karangan-karangan ahli hukum pidana, mengetahui unsur-unsur sengaja dalam tindak pidana pembunuhan sangat penting karena bisa saja terjadi kematian orang lain, sedangkan kematian itu tidak sengaja atau tidak dikehendaki oleh si pelaku.

Secara umum Zainal Abidin Farid menjelaskan bahwa secara umum sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni:

1. Sengaja sebagai niat;

⁵⁴ R Soesilo, Op.Cit, hlm 240

2. Sengaja insaf akan kepastian;
3. Sengaja insaf akan kemungkinan.⁵⁵

Menurut Anwar mengenai unsur sengaja sebagai niat, yaitu:⁵⁶

Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya nyawa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan tujuan atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang.

Sedangkan Prdjodikoro berpendapat sengaja insaf akan kepastian, sebagai berikut: ⁵⁷

Kesengajaan semacam ini ada apabila sipelaku, dengan perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu benar, bahwa akibat itu mengikuti perbuatan itu.

Selanjutnya Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan, sebagai berikut:⁵⁸

Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur kesengajaan meliputi tindakannya dan obyeknya yang

⁵⁵ Zainal Abidin Farid, *Op.Cit*, hlm 262

⁵⁶ Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung, Cipta Adya Bakti, 1994, hlm 89.

⁵⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Aditama, 2003, hlm 63

⁵⁸ Laden Marpaung, *Op.Cit*, hlm 18.

artinya pelaku mengetahui dan menghendaki hilangnya nyawa seseorang dari perbuatannya.

b) Unsur *Obyektif*:

1) Perbuatan: menghilangkan nyawa;

Menghilangkan nyawa orang lain hal ini menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan itu telah menunjukkan akibat yang terlarang atau tidak, apabila karena (misalnya: membacok) belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini baru merupakan percobaan pembunuhan (Pasal 338 jo Pasal 53), dan belum atau bukan merupakan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan Pasal 338.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- Adanya wujud perbuatan.
- Adanya suatu kematian (orang lain)
- Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal Verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).⁵⁹

Menurut Wahyu Adnan, mengemukakan bahwa:⁶⁰

Untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan walaupun perbuatan tersebut, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari

⁵⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta, P.T.Raja Grafindo, 2010, hlm 57.

⁶⁰ Wahyu Adnan, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Bandung, Gunung Aksara, 2007, hlm 45.

perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan.

Dari ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan di atas, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat perbedaan antara berbagai kejahatan yang dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberikan kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut.⁶¹

- a) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *doodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut *moord*. *Doodslag* diatur dalam Pasal 338 KUHP sedang *moord* di atur dalam Pasal 340 KUHP

⁶¹ *Ibid*, hlm 11-13

- b) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *kinderdoodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut *kindermoord*. Jenis kejahatan yang terlebih dahulu itu oleh pembentuk undang-undang disebut *kinderDoodslag* dalam Pasal 341 KUHP dan adapun jenis kejahatan yang disebut kemudian adalah *kindmoord* diatur dalam Pasal 342 KUHP
- c) Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan bersungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP.
- d) Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 KUHP.
- e) Kejahatan berupa kesengajaan menggurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu yang oleh pembuat

undang-undang telah disebut dengan kata *afdrijving*. Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembuat undang-undang masih membuat perbedaan antara beberapa jenis *afdrijving* yang di pandangnya dapat terjadi dalam praktik, masing-masing yaitu:

- Kesengajaan menggugurkan kandungan dilakukan orang atas permintaan wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 346 KUHP.
- Kesengajaan menggugurkan kandungan orang tanpa mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 347 KUHP.
- Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang dengan mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang diatur dalam Pasal 348 KUHP.
- Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang pelaksanaannya telah dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan, atau seorang peramu obat-obatan, yakni seperti yang diatur dalam Pasal 349 KUHP.⁶²

4. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan dengan rencana dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari segala bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 yang rumusannya adalah:

⁶² P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, *Op.Cit*, hlm 11-13

Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.⁶³

Rumusan Pasal 340 KUHP terdiri dari unsur-unsur:

a) Unsur Subyektif

- 1) Dengan sengaja;
- 2) Dan dengan rencana terlebih dahulu;

b) Unsur Objektif;

- 1) Perbuatan : Menghilangkan nyawa;
- 2) Objeknya : Nyawa Orang Lain.

C. Tinjauan Umum Terhadap Anak

1. Pengertian Anak.

Terdapat beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan begitu juga menurut para pakar. Namun tidak ada keseragaman mengenai pengertian anak tersebut. Secara umum kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang masih belum dewasa atau masih belum kawin.

Berikut ini merupakan beberapa perbedaan pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan.

⁶³ R, Soesilo, *Op.Cit*, hlm 240

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Pasal 330 ditetapkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 45, anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan apabila ditinjau batasan umur anak sebagai korban kejahatan (Bab XIV) adalah apabila berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dalam pasal 1 ayat (8) ditentukan bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak negara, dan anak sipil yang dididik di lapas paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, penjelasan tentang anak terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 3 Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Nomor: 1/PUU-VII/2010, Tanggal 24 Februari 2011, Terhadap Pengadilan Anak Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa frase '8 tahun' dalam pasal 1 angka 1, pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga MK memutuskan batas minimal usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum adalah 12 tahun.

Sedangkan pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut:

Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa:

“selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.”⁶⁴

Adapun Hilman Hadikusuma masih dalam buku yang sama merumuskannya dengan:

“Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual

⁶⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010, hlm 32

beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin.”⁶⁵

Dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan batasan pengertian anak yakni seseorang telah mencapai usia 8 (delapan) tahun dan belum 18 (delapan belas) tahun serta belum kawin.

2. Sebab-Sebab Timbulnya Kenakalan Anak

Zakiah Drajat mengemukakan terjadinya kenakalan anak remaja:

Dimana kekacauan dan kegelisahan atau tekanan perasaan yang dideritanya, dipantulkan keluar dalam bentuk kelakuan yang mungkin mengganggu orang lain atau dirinya sendiri, sering kali menyebabkan timbulnya kenakalan anak atau remaja.⁶⁶

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Yang dimaksud anak nakal adalah:

- a) Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁶⁷

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Yesmil Anwar, dan Adang, *Kriminologi*, Bandung Refika Aditama, 2010, hlm 384.

⁶⁷ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 26.

Dengan menggunakan logika yang sangat sederhana, kita akan menyetujui bahwa pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk berbuat baik, akan tetapi, untuk mewujudkannya terkadang ia harus bergulat dengan faktor yang ada di dalam dirinya atau juga kemungkinan situasi dan kondisi, yang menjadikan dirinya berbuat sebaliknya.⁶⁸

Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi *instrintik* dan motivasi *ekstrintik* yang menyebabkan kenakalan anak:

a) Motivasi *intrinstik* dari kenakalan anak-anak ialah:

- 1) Faktor *intelegentia*;
- 2) Faktor usia;
- 3) Faktor kelamin;
- 4) Faktor kedudukan anak dalam keluarga.

b) Yang termasuk motivasi *ekstrinsik* adalah:

- 1) Faktor rumah tangga;
- 2) Faktor pendidikan dan sekolah;
- 3) Faktor pergaulan anak;
- 4) Faktor mass media.

3. Pertimbangan Pemidanaan Anak.

Hakim yang menangani perkara pidana anak sedapat mungkin mengambil tindakan yang tidak memisahkan anak dari orang tuanya,

⁶⁸ Walyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 1991, hlm

atas pertimbangan bahwa rumah yang jelek lebih baik dari lembaga pemasyarakatan anak yang baik (*a bad home is better than a good institution/prison*). Hakim seyogyanya benar-benar teliti dan mengetahui segala latar belakang anak sebelum sidang dilakukan.⁶⁹

Dalam hal hakim memutuskan untuk memberikan pidana pada anak maka ada tiga hal yang perlu diperhatikan:

- a) Sifat kejahatan yang dijalankan;
- b) Perkembangan jiwa si anak;
- c) Tempat dimana ia harus menjalankan hukumannya.⁷⁰

Sejak adanya sangkaan atau diadakannya penyelidikan sampai diputuskan pidananya dan menjalani putusan tersebut, anak harus didampingi oleh petugas sosial yang membuat/*case study* tentang anak dalam sidang.

Adapun yang tercantum dalam *case study* ialah gambaran keadaan si anak, berupa:

- a) Masalah sosialnya;
- b) Kepribadiannya;
- c) Latar belakang kehidupannya, misalnya:
 - 1) Riwayat sejak kecil;
 - 2) Pergaulannya didalam dan diluar rumah;

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Wigiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Ketiga, Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010, hlm 45-47

- 3) Keadaan rumah tangga si anak;
- 4) Hubungan antara bapak ibu dan si anak;
- 5) Hubungan si anak dengan keluarganya dan lain-lain;
- 6) Latar belakang saat diadakannya tindak pidana tersebut.⁷¹

case study ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan anak dikemudian hari, karena didalam memutuskan perkara anak dengan melihat *case study* dapat dilihat dengan nyata keadaan si anak secara khusus (pribadi). Sedangkan apabila hakim yang memutus perkara anak tidak dibantu dengan pembuatan *case study*, maka hakim tidak akan mengetahui keadaan sebenarnya dari si anak sebab hakim hanya boleh bertemu terbatas dalam ruang sidang yang hanya memakan waktu beberapa jam saja dan biasanya dalam *case study* petugas BISPA menyarankan kepada hakim tindakan-tindakan yang sebaiknya diambil oleh para hakim guna kepentingan dan lebih memenuhi kebutuhan.⁷²

4. Jenis Pidana dan Tindakan Bagi Anak Nakal

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 terhadap nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Bunani Hidayat, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, Bandung, P.T. Alumni, 2010, hlm 111.

tindakan. Dengan menyimak Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diatur pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal.

a) Pidana Pokok.

Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, yaitu:

1) Pidana penjara

Pidana penjara berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi anak nakal $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ancaman pidana orang dewasa atau paling lama 10 (sepuluh tahun). Kecuali itu, pidana mati dan penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan terhadap anak.

Terdapat perbedaan perlakuan dan perbedaan ancaman pidana terhadap anak, hal ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara (vide penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997).

Mengenai ancaman pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana, mengacu Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, pada pokoknya sebagai berikut.

- Pidana penjara yang dapat jatuhkan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara dari orang dewasa.
- Apabila melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- Apabila anak tersebut belum mencapai 12 (dua belas tahun) melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka hanya dapat dijatuhkan tindakan berupa “menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja”.
- Apabila anak tersebut belum mencapai 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup maka dijatukan salah satu tindakan.

2) Pidana kurungan

Dinyatakan dalam Pasal 27 bahwa pidana kurungan yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa adalah maksimum ancaman pidana kurungan

terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai yang ditentukan dalam KUHP atau undang-undang lainnya (penjelasan Pasal 27).

3) Pidana denda.

Seperti pidana penjara dan pidana kurungan maka penjatuhan pidana denda terhadap anak nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa (vide Pasal 28 ayat (1)). Undang-undang pengadilan anak mengatur pula ketentuan yang relatif baru yaitu apabila pidana denda tersebut ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja. Undang-undang menetapkan demikian sebagai upaya untuk mendidik anak yang bersangkutan agar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya (vide penjelasan pasal 28 ayat (2)).

Lama wajib latihan kerja sebagai pengganti denda, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari (vide penjelasan Pasal 23 ayat (3)). Tentunya hal demikian mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak serta perlindungan anak.

4) Pidana pengawasan.

Pidana pengawasan dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan ketentuan sebagai berikut.

- lamanya paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- Pengawasan terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dilakukan oleh jaksa.
- Pemberian bimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

5) Pidana Tambahan

Seperti telah disebut bahwa selain pidana pokok maka terhadap anak nakal juga dapat dijatuhkan pidana tambahan yang berupa:

- Perampasan barang-barang tertentu; dan atau
- Pembayaran ganti rugi.

6) Tindakan

Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal (Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) adalah:

- Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau

- Menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.⁷³

⁷³ *Ibid*, hlm 26-30

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih dalam melakukan pengumpulan data guna menunjang penelitian ini adalah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru. Alasan dipilihnya pengadilan Negeri Barru sebagai lokasi penelitian yakni karena lokasi tersebut pernah menangani beberapa perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis yaitu:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan para hakim yang pernah menangani perkara tindak pidana pembunuhan oleh anak di bawah umur.
2. Data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh melalui studi pustaka berupa buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, internet lain-lain, yang berkaitan dengan masalah yang diteleti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dilakukan dengan dua cara yakni:

1. Penilaian kepustakaan (*library reseach*) penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Penelitian lapangan (*field reseach*). Penelitian yang dilaksanakan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengadakan pengamatan langsung. Metode ini menempuh dua cara yaitu:
 - a) Wawancara langsung dengan hakim yang pernah menangani perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
 - b) Dokumentasi yaitu menelusuri data berupa dokumen dan arsip yang diberikan oleh pihak terkait.

D. Analisa Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak.

Sebelum penulis menguraikan mengenai penerapan hukum pidana materiil dalam kasus putusan No 40/Pid.Sus/2012/PN.BR, maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus dan penjatuhan putusan oleh majelis hakim dengan melihat acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

1. Posisi Kasus

Pada hari Jumat, tanggal 20 April 2012, sekitar pk1 09.30 wita, Terdakwa menelpon ALDI meminta untuk dijemput dan kemudian bersama dengan ALDI (Terdakwa diberkas perkara lainnya) menuju ke Kantor Perpustakaan Daerah Kab. Barru (tempat kumpul sehari-hari Terdakwa bersama teman-temannya), setelah sampai di Kantor perpustakaan Daerah Kab. Barru, RAHMAT HIDAYAT (terdakwa diberkas perkara lainnya) AHMAD (terdakwa diberkas perkara lainnya) dan HERMAN (Terdakwa diberkas perkara lainnya) sudah berada lebih dahulu ditempat tersebut kemudian pada saat Terdakwa ALDI, RAHMAT HIDAYAT, AHMAD, HERMAN berbincang-bincang, Terdakwa lalu memanggil HERMAN dan RAHMAT HIDAYAT, meminta untuk menjauh dari tempat mereka berbincang, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada HERMAN dan RAHMAT HIDAYAT dengan mengatakan "saya mau eksekusi cewekku (korban Pr. MUNAH)" lalu dijawab oleh terdakwa "saya takut kalau keluarga Pr. MUNAH datang ke rumah saya untuk meminta pertanggung jawaban atas kehamilannya"

Selanjutnya HERMAN menyarankan kepada Terdakwa dengan mengatakan "jangan meko eksekusi, kasih gugurmi saja", dijawab kembali oleh terdakwa "saya sudah tesmi dan hasilnya negatif, cuma saya ragu karena sampai sekarang Pr. MUNAH mengatakan ia belum haid" dan tidak berselang lama SANDI (terdakwa diberkas perkara lainnya) datang.

Setelah hal tersebut disampaikan oleh terdakwa kepada HERMAN dan RAHMAT HIDAYAT, selanjutnya dihadapkan ALDI, RAHMAT HIDAYAT, AHMAD, HERMAN dan SANDI, terdakwa lalu berdiri meletakkan sebilah badik pada meja sambil berkata “saya eksekusi sebentar cewekku (Pr. MUNAH)” setelah itu Terdakwa membungkus badik tersebut menggunakan kain skraf kemudian menyelipkannya di pinggang sebelah kanan.

Kemudian Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada Pr. MUNAH menyampaikan “dimana?, nanti saya suruh temanku jemput kita, karena ada acaranya anak Suskuber” lalu dijawab oleh Pr. MUNAH “dimana?” kemudian dijawab oleh Terdakwa “saya tidak tahu, karena saya juga ini ada di Makassar”, lalu dijawab oleh Pr. MUNAH “ aii....tidak maujaka kalau tidak ada kita” lalu dijawab oleh terdakwa “iya, saya juga ini mau turun ke Barru” kemudian dijawab oleh pr. MUNAH “kitami yang jemputka!” dijawab lagi oleh terdakwa “tidak bisaka, ka sudah maumi acaranya.”

Selanjutnya Terdakwa bersama ALDI, RAHMAT HDAYAT, AHMAD, HERMAN dan SANDI menuju ke sekolah SMK 1 Barru dan selanjutnya karena tak satupun dari mereka (Terdakwa, ALDI, RAHMAT HIDAYAT, AHMAD, HERMAN dan SANDI) yang ingin menjemput Pr. MUNAH untuk memuluskan niat Terdakwa menghabisi Pr. MUNAH, Terdakwa bersama ALDI lalu menjemput ILHAM dengan maksud ILHAM yang akan menjemput Pr. MUNAH, kemudian Terdakwa, ALDI dan ILHAM berbonceng tiga menuju ke depan sekolah SMK 1 Barru dan setelah sampai, Terdakwa mengatakan kepada ILHAM “pergiko nanti ambil pacarku ILHAM?” kemudian dijawab oleh ILHAM “jangan dulu karena saya ini bau ikan dan pakaian saya tidak bagus” lalu Terdakwa mengantar ILHAM untuk pulang mandi sekaligus mengganti baju.

Setelah Pr. MUNAH mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada Terdakwa, menyampaikan “saya sudah mau pulang sekolah”, lalu dijawab oleh Terdakwa “tungguiki temanku di depan warnet Anime yang tidak ada temanmu liatko” selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada ILHAM “langsung kau bawaki itu perempuan ke Lajulo”, lalu dijawab oleh ILHAM “saya tidak tahu orangnya yang mau dijemput” Terdakwa lalu menjawab “ikut meko saja”, kemudian ILHAM berangkat menjemput Pr. MUNAH menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam No. Pol. DD 3104 AK milik RAHMAT HIDAYAT dengan helm tutup warna hitam milik SANDI.

Pada saat ILHAM berada di depan warnet Anime, terdakwa yang berboncengan dengan ALDI menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam merah No. Pol. DD 2803 LD milik ALDI, memberi kode kepada ILHAM kearah Pr. MUNAH dengan maksud agar ILHAM mengetahui perempuan yang akan dijemput, selanjutnya Terdakwa langsung menuju

ke Kampung Lajulo bersama ALDI disusul oleh AHMAD, HERMAN, dan RAHMAT HIDAYAT, kemudian dengan maksud agar perbuatan Terdakwa tidak dicurigai oleh masyarakat setempat, Terdakwa, ALDI, AHMAD, HERMAN dan RAHMAT HIDAYAT singgah disekitar Kel. Tuwung untuk menyimpan motor, lalu terdakwa melanjutkan perjalanan ke Lajulo dengan berbonceng tiga AHMAD dan HERMAN menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam No. Pol. DD 3968 LC milik HERMAN.

Setelah sampai di tempat kejadian, Terdakwa turun dari badan jalan, menuju kebalik pohon yang rimbun untuk bersembunyi serta mempersiapkan waktu yang tepat untuk meghabisi Pr. MUNAH, tidak berselang lama ILHAM bersama Pr. MUNAH sampai.

Selanjutnya Terdakwa memanggil ILHAM untuk datang ke tempat Terdakwa, dengan maksud menyampaikan kepada Pr. MUNAH untuk menghampiri Terdakwa, lalu atas penyampaian ILHAM, Pr. MUNAH turun dari badan jalan menuju ke tempat Terdakwa bersembunyi, tetapi oleh karena AHMAD dan HERMAN memanggil terdakwa dengan mengatakan "DICKY...DICKY...(terdakwa) jangan meko, hari Jumat ini", lalu Terdakwa berjalan menghampiri AHMAD dan HERMAN menyampaikan "janganmeko sebut namaku!".

Setelah itu Pr. MUNAH berjalan menuju ke arah terdakwa saat itu pula AHMAD memanggil ILHAM dengan mengatakan "panggilki cepat itu perempuan, mau dianu itu sama DICKY" lalu dari badan jalan, ILHAM langsung memberikan kode kepada Pr. MUNAH untuk tidak menghampiri Terdakwa, tetapi Pr. MUNAH tidak menghiraukan dan tetap berjalan mendekati Terdakwa selanjutnya terdakwa telah siap dengan sebilah badik yang dipegang dengan cara dikepalkan pada bagian belakang, tangan kiri memegang sarung badik sedangkan tangan kanan memegang gagang badik yang siap dihunuskan dari sarungnya dan pada waktu dan tempat tersebut di atas.

Pada saat Pr. MUNAH tepat berada di depan Terdakwa yang menggunakan scarf pada wajahnya langsung menghunuskan badik kemudian menusuk/menikam pada bagian perut sebanyak 2 (dua) kali, tusukan/tikaman pertama pada bagian pusar perut tetapi Pr. MUNAH memegang badik Terdakwa sehingga Terdakwa mencabut paksa dari perut Pr. MUNAH yang mengakibatkan jari telunjuk tangan kanan Pr. MUNAH teriris hampir putus lalu tusukan/tikaman kedua pada bagian kanan pinggang yang mengakibatkan luka robek, setelah itu Pr. MUNAH jatuh berlutut sambil membungkuk memegang perut kemudian Terdakwa menusuk/menikam lagi ke arah belakang/punggung sebanyak dua kali, tusukan tikaman pertama pada punggung bagian kiri, tusukan/tikaman

kedua pada punggung bagian tengah, mengakibatkan pendarahan yang banyak sehingga Pr. MUNAH meninggal dunia.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan disusun dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. Surat dakwaan yang disusun harus memenuhi persyaratan baik formil maupun materiil, sesuai dengan bunyi Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHP disebutkan bahwa syarat formil surat dakwaan meliputi :

- surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum pembuat surat dakwaan;
- Surat dakwaan harus memenuhi secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi: nama lengkap, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;

Adapun syarat-syarat materiil surat dakwaan adalah tentang :

- Tindak pidana yang dilakukan;
- Siapa yang melakukan tindak pidana;
- Dimana tindak pidana dilakukan;
- Bilamana/kapan tindak pidana dilakukan;
- Bagaimana tindak pidana dilakukan;
- Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materiil);

- Apa yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik-delik tertentu);
- Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan;

Surat Dakwaan adalah sebuah akta yang dibuat oleh penuntut umum yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Surat dakwaan merupakan senjata yang hanya bisa digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan atas asas *oportunitas* yang memberikan hak kepada jaksa penuntut umum sebagai wakil dari negara untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa pelaku tindak pidana.

Dalam surat dakwaan uraiannya harus Jelas, maksudnya ialah penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana (delik) yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain uraian unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan/ digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga dalam uraian unsur-unsur dakwaan dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai *Pelaku (dader/pleger)*, *pelaku peserta (mede dader/pleger)*, *penggerak (uitlokker)*, *penyuruh (doen pleger)* atau *hanya sebagai pembantu (medeplichting)*. Apakah unsur yang diuraikan tersebut sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan atau pencurian dan sebagainya. Dengan perumusan unsur tindak pidana secara jelas dapat dicegah terjadinya

kekaburan dalam surat dakwaan (*obscuur libel*). Pendek kata, jelas berarti harus menyebutkan :

- 1) Unsur tindak pidana yang dilakukan;
- 2) fakta dari perbuatan materiil yang mendukung setiap unsur delik;
- 3) cara perbuatan materiil dilakukan.

Selain harus jelas surat dakwaan harus lengkap dimana dalam menyusun surat dakwaan harus diuraikan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam UU secara lengkap dalam arti tidak boleh ada yang tercecer/ tertinggal tidak tercantum dalam surat dakwaan. Surat dakwaan harus dibuat sedemikian rupa dimana semua harus diuraikan, baik unsur tindak pidana yang didakwakan, perbuatan materiil, waktu dan tempat dimana tindak pidana dilakukan sehingga tidak satupun yang diperlukan dalam rangka usaha pembuktian di dalam sidang pengadilan yang ketinggalan.

Dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan atau Pasal-Pasal yang mengatur tentang bentuk dan susunan Surat Dakwaan, sehingga dalam praktik penuntutan masing-masing penuntut umum dalam menyusun Surat Dakwaan pada umumnya sangat dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman praktik masing-masing.

Setelah melihat Putusan Pengadilan Negeri Barru No 40/Pid.Sus/2012/PN.BR. dapat disimpulkan bahwa dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum adalah surat dakwaan Subsider.

Surat dakwaan subsider adalah surat dakwaan yang di dalamnya dirumuskan beberapa tindak pidana secara berlapis dimulai dari delik

yang paling berat ancaman pidannya sampai dengan yang paling ringan. Akan tetapi yang sesungguhnya didakwakan terhadap terdakwa terdakwa dan yang harus dibuktikan di depan sidang pengadilan hanya “satu” dakwaan. Dalam hal ini pembuat dakwaan bermaksud agar hakim memeriksa secara cermat perkara tersebut. Ini dapat dilihat dalam susunan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor Register Perkara: PDM-44/Barru/05/2012 sebagai berikut:

- Pertama : perbuatan terdakwa Aliefka Dicky Pratama Bin Arham Als. Dicky sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 340 KUHPidana.
- Kedua : perbuatan terdakwa Aliefka Dicky Pratama Bin Arham Als. Dicky sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 338 KUHPidana
- Ketiga : perbuatan terdakwa Aliefka Dicky Pratama Bin Arham Als. Dicky sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 80 Ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan jaksa penuntut umum, diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan disidang pengadilan dinyatakan selesai sesuai dengan Pasal 182 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa surat tuntutan dibacakan setelah proses pembuktian di persidangan pidana selesai dilakukan.

Surat tuntutan ini sendiri berisikan tuntutan pidana. Surat Tuntutan atau dalam bahasa lain disebut dengan Requisitor adalah surat yang memuat pembuktian Surat Dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan terdakwa disertai dengan tuntutan pidana. Agar supaya Surat Tuntutan tidak mudah untuk disanggah oleh terdakwa/

penasehat hukumnya, maka Surat Tuntutan harus dibuat dengan lengkap dan benar. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat Surat Tuntutan :

- Surat Tuntutan harus disusun secara sistematis.
- Harus menggunakan susunan tata bahasa indonesia yang baik dan benar.
- Isi dan maksud dari Surat Tuntutan harus jelas dan mudah dimengerti.
- Apabila menggunakan teori hukum harus menyebut sumbernya.

Adapun tuntutan dalam perkara pidana dalam Putusan No 40/Pid.Sus/2012/PN.BR. dapat dilihat dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM-88/Barru/03/2011, yang pada pokoknya meminta kepada majelis hakim untuk memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Aliefka Dicky Pratama Als. Dicky Bin Arham terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 340 KUHPidana, dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aliefka Dicky Pratama Als. Dicky Bin Arham dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan masa penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang seragam sekolah pramuka warna coklat muda dan coklat tua;
 - 1 (satu) unit handphone merek Mito warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni keluarga korban Pr. Munah ;

- 1 (satu) lembar baju sweeter warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar skarf warna biru tua corak putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type X2 warna hitam bis merah;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam No. Pol. DD 3968 LC beserta STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam No. Pol. DD 3104 AK beserta STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam merah, No. Pol DD 2803 LD beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam bis merah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa ALIEFKA DICKY PRATAMA Als. DICKY Bin ARHAM membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

5. Analisa Penulis

Menurut penulis surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formal dan materiil surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, yaitu harus memuat tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum serta identitas lengkap terdakwa, selain itu juga harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Penyusunan surat dakwaan penuntut umum harus bersifat

cermat atau teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak terjadi kekurangan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan.

Dakwaan yang didakwakan merupakan dakwaan Subsider sehingga majelis hakim langsung memilih dan membuktikan dakwaan mana yang dirasa unsur-unsurnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Terdakwa dalam kasus ini berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, di kenakan Pasal 340 kitab Undang-undang Hukum Pidana. Apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang telah dibahas sebelumnya maka unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi dari perbuatan itu dapat di hukum, adalah sebagai berikut:

A. Unsur barang siapa.

Unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang merupakan subjek hukum berupa manusia yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan yang saat ini sedang di dakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error in persona*) maka identitasnya harus di uaraikan secara cermat jelas dan lengkap dalam surat dakwaan.

Dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ialah Alifka Dicky Pratama Bin Arham Sebagaimana identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau unsur barang siapa dalam putusan perkara No 40/Pid.sus/2012/PN.BR.

B. Unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu.

Dengan Sengaja atau kesengajaan sering kali menjadi perdebatan dan polemik dikalangan para ahli dan praktisi hukum, karena *Memorie Vantoelichting* tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata dengan sengaja atau kesengajaan, sehingga kita hanya berpedoman dari adanya perbedaan antara *dolus* dan *culpa* dimana delik-delik culpa perbuatan dilakukan karena kealpaan sedangkan lawan dari kealpaan adalah kesengajaan.

Mahkamah Agung dari berbagai yurisprudensinya memberikan batasan yang lebih jelas tentang kesengajaan yang bersumber dari sudut formil maupun materiil, sehingga “Dengan Sengaja” atau kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki.

Dalam berbagai doktrin ilmu hukum, kata sengaja atau kesengajaan dapat ditinjau dari dua teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan.

Menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu. Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan tersebut.

Sedangkan dalam Teori Bayangan/pengetahuan, bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuatnya atau dilakukannya itu dapat menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu.

Sengaja atau kesengajaan bisa dikaitkan dengan unsur kehendak (*opzet*) yang bisa dibedakan dalam kehendak sebagai kesengajaan (*dolus*) dan kehendak sebagai kealpaan (*culpa*).

Yang dimaksud dengan “Direncanakan Terlebih dahulu” dalam penjelasan pasal ini yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi sipembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, ditemukan fakta hukum, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa tidur berbaring-baring di rumah neneknya di Gempunge sambil memikirkan masalahnya dengan pacarnya yaitu korban Pr. MUNAH yang sampai sekarang belum menstruasi, sehingga keluarga korban Pr. MUNAH akan datang meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikahi korban Pr. MUNAH padahal keluarga Terdakwa tidak ingin terdakwa menikah dulu karena Terdakwa masih harus bersekolah dan dianggap belum bisa menafkahi korban Pr. MUNAH.

Setelah memikirkan masalahnya yang harus diselesaikan sebelum awal bulan Mei, tiba-tiba Terdakwa teringat dengan badik yang disimpannya, kemudian Terdakwa mengambil badik tersebut dan berniat “mengekseseksi” pacarnya tersebut.

Terdakwa lalu menelpon saksi ALDI untuk menjemputnya di depan MTS Mangempang, sekitar pukul 09.45 saksi ALDI dengan

menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna merah hitam No.Pol DD 2803 LD datang menjemput Terdakwa di depan Mts Mangempang.pada saat itu Terdakwa sudah mengenakan sweter dengan penutup kepala dan kain skarf untuk menutup mukanya, setelah itu mereka berboncengan menuju Perpustakaan Daerah sebelumnya Terdakwa juga sudah menghubungi saksi RAHMAT untuk datang ke Perpustakaan Daerah. Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi ALDI tiba di Perpustakaan Daerah, disana telah ada saksi RAHMAT, saksi AHMAD, dan saksi HERMAN yang duduk di Payung I, kemudian Terdakwa yang langsung duduk di Payung II memanggil saksi RAHMAT dan saksi HERMAN dan berkata “mauka eksekusi cewekku” lalu saksi HERMAN mengatakan “kenapako mau eksekusi cewekmu” lalu terdakwa mengatakan “nanti keluarganya datang meminta pertanggungjawaban karena sudah hamil, sudah saya tes dan hasilnya negatif, tapi sampai sekarang dia belum haid”, lalu saksi HERMAN mengatakan “janganmako eksekusi, gugurkanmi saja”, Terdakwapun diam, setelah itu mereka bertiga kembali ke payung I dan pada saat itu sudah ada saksi SANDI, setelah berkumpul di payung I Terdakwa kemudian mengeluarkan badiknya dan mengatakan kepada teman-temannya yang lain yaitu saksi RAHMAT, saksi AHMAD, saksi SANDI, saksi ALDI, dan saksi HERMAN “mauka eksekusi cewekku, badik ini harus merah!”

setelah itu Terdakwa membungkus badik tersebut dengan kain skrafnya. Bahwa terdakwa kemudian meminta kepada teman-temannya tersebut untuk menjemput pacar terdakwa (korban Pr. MUNAH) akan tetapi tidak ada satupun saksi yang mau menjemput korban Pr. MUNAH, sehingga Terdakwa berboncengan dengan saksi ALDI pergi mencari orang lain yang mau menjemput korban Pr. MUNAH, diperjalanan Terdakwa teringat temannya yaitu saksi ILHAM, maka Terdakwa dan saksi ALDI pergi ke rumah saksi ILHAM di Tempat Pelelangan Ikan Sumpang Binange, sesampai disana saksi ILHAM sedang tertidur dan Terdakwapun membangunkan saksi ILHAM dan mengatakan “pergiko dulu jemput cewek!”, setelah itu mereka berboncengan tiga pergi ke depan SMK Neg 1 Barru dan disana telah ada saksi RAHMAT, saksi AHMAD, saksi SANDI dan saksi HERMAN. Bahwa saksi ILHAM meminta kepada Terdakwa untuk diantar pulang karena saksi ILHAM belum mandi dan masih bau ikan, sehingga Terdakwa mengantar saksi ILHAM mandi dan setelah mandi mereka kembali ke depan SMK Neg 1 Barru. Bahwa dari SMK Neg 1 Barru Terdakwa dan saksi RAHMAT, saksi AHMAD, saksi SANDI, saksi HERMAN, saksi ALDI, dan saksi ILHAM pergi menuju ke Perpustakaan Daerah. Diperpustakaan Daerah Terdakwa menerima SMS dari korban Pr. MUNAH yang mengatakan korban sudah mau pulang sekolah, dan SMS itu dibalas oleh Terdakwa yang mengatakan tunggu di depan warnet Anime, nanti ada teman

Terdakwa yang akan menjemput korban. Lalu Terdakwa menyuruh saksi ILHAM untuk menjemput korban Pr. MUNAH ke Lajulo dengan menggunakan motor milik saksi RAHMAT yaitu motor Yamaha Mio Soul No. Pol DD 3104 AK dan membawa helm saksi SANDI yaitu Helm GM merah hitam dengan kaca depan berwarna gelap.

setelah itu terdakwa yang dibonceng oleh saksi ALDI menunjukkan letak warnet Anime yang terletak di Jl. A.M. Akbar kepada saksi ILHAM dan pada saat itu korban Pr. MUNAH sudah berdiri menunggu di depan warnet tersebut, lalu saksi ILHAM menjemputnya dan memberikan helm milik saksi SANDI untuk dipakai oleh korban Pr. MUNAH, setelah itu mereka berangkat ke Lajulo. Bahwa diperjalanan tepatnya di depan SLB, Terdakwa yang berboncengan dengan saksi ALDI bertemu dengan saksi AHMAD yang berboncengan dengan saksi HERMAN, lalu Terdakwa memberi kode mereka dengan menganggukkan kepalanya agar mereka berdua ikut dengan Terdakwa. Bahwa terdakwa dan saksi ALDI kemudian singgah di Tuwung karena saksi ALDI takut dikenali oleh korban Pr. MUNAH maka saksi ALDI tidak ikut ke Lajulo dan menyimpan motornya di Tuwung, lalu Terdakwapun berpindah motor ke motor milik saksi HERMAN yaitu motor Yamaha Jupiter Z warna hitam No. Pol. DD 3968 LC. Kemudian Terdakwa berboncengan tiga dengan saksi AHMAD dan saksi HERMAN menuju ke Lajulo, akan tetapi di tengah perjalanan tepatnya di depan SMA Neg. 2 Unggulan

Terdakwa bertemu dengan saksi ILHAM yang membonceng korban Pr. MUNAH, lalu Terdakwa menunjukkan jalan kepada saksi ILHAM untuk melewati jalan beton menuju Lajulo.

Di Lajulo yang juga merupakan lokasi tempat kejadian perkara Terdakwa lalu menghunuskan badiknya dan menikam bagian perut korban Pr. MUNAH sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa mencabut badiknya dari perut korban Pr. MUNAH, dan pada saat terdakwa mencabut badiknya, korban Pr. MUNAH memegang badik tersebut sehingga jari tangan telunjuk kanannya teriris dan hampir putus, lalu Terdakwa menusukkannya lagi untuk kedua kalinya, pada saat itu korban Pr. MUNAH berbalik sehingga mengenai pinggang kanan korban Pr. MUNAH, kemudian korban Pr. MUNAH menunduk sambil berlutut lalu Terdakwa menusuk lagi di bagian punggung kirinya. Bahwa setelah menikam korban Pr. MUNAH Terdakwa naik ke atas jalan beton dan membunyikan motor yang dipakai saksi ILHAM kemudian Terdakwa dan saksi ILHAM berboncengan pergi ke rumah ibu kandung Terdakwa. Bahwa badik yang digunakan oleh Terdakwa untuk menikam korban Pr. MUNAH sudah Terdakwa buang ke sungai Jampue Barru. Bahwa Terdakwa pada saat itu memakai sweter dengan penutup kepala, kain skarf untuk menutup wajahnya, dan helm dengan kaca hitam dan Terdakwa mengenakan pakaian tersebut agar tidak dikenali oleh korban Pr. MUNAH.

Dari posisi kasus diatas dapat dilihat timbulnya niat pelaku dapat dilihat pada saat di rumah nenek Terdakwa sambil berbaring-barang memikirkan bagaimana jalan keluar permasalahannya dengan korban Pr. MUNAH, lalu Terdakwa mengambil badiknya tersebut dengan maksud akan “mengeksekusi” korban Pr. MUNAH, dan niat tersebut disampaikan kepada teman-temannya yaitu saksi RAHMAT, saksi AHMAD, saksi SANDI, saksi ALDI, dan saksi HERMAN, dan Terdakwa telah menyusun rapih rencananya secara detil dengan memakai sweter dengan penutup kepala, scarf untuk menutup wajahnya, dan menggunakan helm berwarna gelap dimana Terdakwa menggunakan semua perlengkapan tersebut agar tidak dikenali oleh korban Pr. MUNAH sehingga dapat menghilangkan jejaknya. Bahwa Terdakwa juga memilih tempat untuk mengeksekusi korban Pr. MUNAH di tempat yang sepi yang jarang dikunjungi orang yaitu di Lajulo dengan maksud agar ketika maksud perbuatannya itu dilaksanakan tidak ada orang lain yang melihatnya sehingga Terdakwapun bersembunyi di belakang semak-semak menunggu korban Pr. MUNAH, selain itu Terdakwa juga tidak menjemput sendiri korban Pr. MUNAH akan tetapi menyuruh orang lain menjemputnya yaitu saksi ILHAM agar korban Pr. MUNAH masih mengira Terdakwa masih dalam perjalanan dari Makassar ke Barru, dan Terdakwapun menghilangkan bukti berupa badik yang digunakan menikam korban Pr. MUNAH dengan cara membuang

badik tersebut di sungai Jampue Barru, sehingga dari cara-cara atau perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu” telah terbukti atas diri Terdakwa

C. unsur menghilangkan nyawa orang lain.

Dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa telah menikam korban Pr. MUNAH dengan menggunakan sebilah badik pada bagian perut korban Pr. MUNAH sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa mencabut badiknya dari perut korban Pr. MUNAH, dan pada saat terdakwa mencabut badiknya, korban Pr. MUNAH memegang badik tersebut sehingga jari tangan telunjuk kanan korban Pr. MUNAH teriris dan hampir putus, lalu Terdakwa menusukkannya lagi untuk kedua kalinya, pada saat itu korban Pr. MUNAH berbalik sehingga mengenai pinggang kiri korban Pr. MUNAH, kemudian korban Pr. MUNAH menunduk sambil berlutut lalu Terdakwa menusuk lagi di bagian punggung kanannya, dimana perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban Pr. MUNAH meninggal dunia, hal ini diperkuat dengan adanya hasil Visum Et Repertum nomor : 285-RSUD-BR-IV-2012 atas nama SITTI MAEMUNA, tertanggal 27 April 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah Barru, Kab. Barru, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KHAERANOVIANTI Dokter pada RSUD Barru

Dari Fakta Hukum di atas jelas terlihat adanya unsur menghilangkan nyawa orang lain, yang dilakukan oleh pelaku alifka dicky pratama dengan cara membunuh pacarnya sendiri pr.munah.

Unsur menghilangkan nyawa orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu delik materiil. Delik materiil adalah suatu delik yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang atau akibat kondusif) untuk dapat terjadi atau timbulnya delik materiil secara sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak dalam atau pasif, walaupun sekecil apapun.

Dari segi tanggung jawab pidana, maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari sipembuat, adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya (disengaja, sikap kurang hati-hati atau lalai) serta tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat. Mengikat hal diatas sukar atau melakukan

waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab, kecuali kalau jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan sekalipun tidak dimintakan oleh pihak terdakwa. Sedangkan terdakwa dalam hal ini terlihat baik-baik saja, tidak adanya tanda-tanda yang menunjukkan jiwanya tidak normal.

Berdasarkan hasil analisis penulis, maka penulis berpendapat bahwa penerapan hukum pidana materil pada perkara ini yakni Pasal 340 KUHP telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak.

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya. Kalau hakim menjatuhkan putusan, maka ia akan selalu berusaha agar putusannya sedapat mungkin dapat diterima masyarakat, hakim akan merasa lega manakala putusannya dapat diterima serta memberikan kepuasan kepada semua pihak dalam suatu perkara, dengan alasan-alasan atau pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Untuk itu hakim dalam menjatuhkan putusan berpedoman pada pertimbangan yuridis dan non yuridis.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yuridis antara lain terdiri dari:

a) Pertimbangan Fakta dan Pertimbangan Hukum Hakim

Untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Ilham alias Ile Bin Alwi, saksi Herman Bin Abdullah, saksi Rijal Bin Samade, saksi Rahmat Hidayat alias Rahmat Bin Muzakkir, saksi Ahmad Bin Danial, saksi Aldi Risaldi alias Aldi Bin Abdullah, saksi Sandi Sulastro Bin Ramli.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang di ajukan dipersidangan maka d peroleh fakta-fakta sebagai berikut.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Lajulo, Kel. Tuwung, Kec. Barru, Kab. Barru, Terdakwa telah menikam korban Pr. MUNAH;
- Bahwa akibat tikaman tersebut korban Pr. MUNAH meninggal dunia;
- Bahwa korban Pr. MUNAH adalah pacar Terdakwa;

- Bahwa selama berpacaran dengan korban Pr. MUNAH, Terdakwa telah dua kali berhubungan badan dengan korban Pr. MUNAH;
- Bahwa Terdakwa menikam korban Pr. MUNAH karena korban Pr. MUNAH hamil dan Terdakwa takut keluarga korban datang meminta pertanggungjawaban sedangkan pihak keluarga Terdakwa tidak menyetujuinya karena terdakwa masih ingin bersekolah dan belum mampu memberi nafkah untuk korban Pr. MUNAH;
- Bahwa niat Terdakwa membunuh korban Pr. MUNAH timbul pada saat Terdakwa yang tiba dari Makassar sedang berbaring-barang di kamar di rumah Kakeknya di Gempunge, pada saat itu Terdakwa memikirkan masalah pacarnya Pr. MUNAH yang belum haid dan Terdakwa diultimatum oleh ibu korban Pr. MUNAH agar menikahi korban Pr. MUNAH karena sampai saat itu korban Pr. MUNAH belum menstruasi, sedangkan keluarga Terdakwa tidak ingin terdakwa menikah karena Terdakwa masih bersekolah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa teringat badiknya, sehingga Terdakwa berniat membunuh korban Pr. MUNAH, setelah itu Terdakwa mengambil badiknya kemudian menyelipkannya di pinggang kanannya, lalu Terdakwa pergi ke depan MTS Neg. Mangempang dan menelpon saksi ALDI untuk menjemputnya disana;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi ALDI menuju ke Perpustakaan Daerah dan pada saat itu telah ada saksi RAHMAT, saksi HERMAN, dan saksi AHMAD yang duduk-duduk di payung I, Terdakwa langsung duduk di Payung II kemudian Terdakwa memanggil saksi RAHMAT dan saksi HERMAN pindah ke payung I, lalu terdakwa mengatakan “mauka eksekusi cewekku”, lalu dijawab oleh saksi HERMAN “kenapako mau eksekusi cewekmu?”, Terdakwa lalu menjawab “saya takut kalau keluarga cewekku datang ke rumah meminta pertanggungjawaban atas kehamilannya’, lalu saksi HERMAN mengatakan “janganmako eksekusi, gugurkanmi saja”, lalu Terdakwa mengatakan “saya sudah tesmi, hasilnya negatif, cuma saya ragu karena sampai sekarang belum haid’, setelah mengatakan demikian Terdakwa bersama-sama saksi HERMAN dan saksi RAHMAT pindah ke payung I;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkumpul di payung I dan pada saat itu telah ada saksi SANDI, saksi AHMAD, dan saksi ALDI, lalu terdakwa mengeluarkan badiknya dan mengatakan “mauka eksekusi cewekku, dan badik ini harus merah”, setelah itu Terdakwa membungkus badiknya dengan kain scarf;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi HERMAN, saksi RAHMAT, saksi AHMAD, saksi ALDI, dan saksi SANDI untuk menjemput cewek Terdakwa akan tetapi tidak ada satupun yang mau

menjemput cewek tersebut, sehingga Terdakwa bersama saksi ALDI berboncengan untuk mencari orang yang mau menjemput cewek tersebut dan akhirnay Terdakwa meminta saksi ILHAM untuk menjemput korban Pr. MUNAH di depan warnet Anime setelah korban Pr. MUNAH pulang dari sekolah;

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi ILHAM untuk berangkat menjemput korban Pr. MUNAH dan membawanya ke Lajulo dengan menggunakan motor milik saksi RAHMAT yaitu sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol DD 3104 AK dan membawa helm milik saksi SANDI yaitu helm GM warna merah hitam dengan kaca depan berwarna gela ;
- Bahwa Terdakwa yang dibonceng oleh saksi ALDI lalu meneruskan perjalanan menuju Lajulo, saat tiba di depan SLB, Terdakwa bertemu dengan saksi AHMAD yang berboncengan dengan saksi HERMAN, yang mengikuti Terdakwa sampai ke Tuwung, Terdakwa dan saksi ALDI singgah di Tuwung karena saksi ALDI tidak bisa mengantar Terdakwa ke Lajulo, saksi ALDI takut motornya dikenali oleh korban Pr. MUNAH, sehingga Terdakwa dan saksi ALDI singgah ke tuwung untuk menyimpan motornya;
- Bahwa di Tuwung Terdakwa kemudian berpindah ke motornya saksi HERMAN yaitu motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. DD 3968

LC, dan Terdakwa berboncengan tiga dengan saksi AHMAD dan saksi HERMAN menuju ke Lajulo;

➤ Bahwa setelah tiba di tempat kejadian, Terdakwa turun berlingkungan di balik semak-semak, lalu Terdakwa memanggil saksi ILHAM dengan berteriak “oe..oe..”, kemudian saksi ILHAM turun ke bawah dan Terdakwa menyuruh saksi ILHAM untuk menyuruh korban Pr. MUNAH turun kebawah menemuinya di balik semak-semak, dan saat korban Pr. MUNAH turun kebawah dan tiba di dekat semak-semak, Terdakwa lalu naik ke atas jalan beton menemui saksi AHMAD, saksi HERMAN, dan saksi ILHAM dan mengatakan kepada mereka “jangan dulu pergi, tungguka’ sebentar!”, lalu Terdakwa turun lagi ke bawah, tiba-tiba saksi HERMAN berteriak “Dicky...Dicky...janganmako anui.....hari jumatki ini”, lalu Terdakwa naik lagi mendatangi saksi HERMAN dan mengatakan “jangko sebut namaku”, lalu Terdakwa kembali turun kebawah;

➤ Bahwa pada saat korban Pr. MUNAH mendatangi Terdakwa, dan berdiri di depan Terdakwa, lalu Terdakwa menghunuskan badiknya dan menikam bagian perut korban Pr. MUNAH sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa mencabut badiknya dari perut korban Pr. MUNAH akan tetapi badik tersebut dipegang oleh korban Pr. MUNAH sehingga jari tangan telunjuk kanan korban Pr. MUNAH teriris dan hampir putus, lalu Terdakwa menusukkannya lagi untuk

kedua kalinya, pada saat itu korban Pr. MUNAH berbalik sehingga mengenai pinggang bagian kanan korban Pr. MUNAH, kemudian korban Pr. MUNAH menunduk sambil berlutut lalu Terdakwa menusuk lagi di bagian punggung kirinya;

- Bahwa badik yang digunakan untuk menikam korban Pr. MUNAH sudah Terdakwa uang ke sungai Jampue Barru;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu memakai sweter dengan penutup kepala, kain scarf untuk menutup wajahnya, dan helm dengan kaca hitam dan Terdakwa mengenakan pakaian tersebut agar tidak dikenali oleh korban Pr. MUNAH;
- Bahwa Terdakwa memang sering membawa badik dan badik tersebut telah lama dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikam korban Pr. MUNAH di Lajulo karena terdakwa mengetahui kalau di Lajulo adalah tempat yang sepi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Pr. MUNAH meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor : 285-RSUD-BR-IV-2012 atas nama SITTI MAEMUNA, tertanggal 27 April 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah Barru, Kab. Barru, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KHAERANOVIANTI Dokter pada RSUD Barru dengan hasil pemeriksaan:
 - Tidak tampak lebam mayat, kaku mayat belum ada
 - Tampak mata terbuka, mulut terbuka

- Luka lecet dibawah payudara kanan dengan ukuran kurang lebih dua kali nol koma lima sentimeter;
- Luka robek di pusar dengan ukuran kurang lebih dua kali satu sentimeter;
- Luka lecet pada lutut kanan;
- Luka-luka lecet di kaki kiri dengan ukuran lebih satu sentimeter;
- Luka tusuk punggung kiri dengan ukuran kurang lebih satu koma lima koma satu kali dua sentimeter dengan pendarahan aktif;
- Luka tusuk punggung bagian tengah dengan ukuran kurang lebih satu koma nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;
- Luka robek dipinggang kanan dengan ukuran kurang lebih tiga kali dua centimeter;
- Luka lecet di kepala bagian bawah belakang;
- Luka-luka lecet bagian tengkuk dengan ukuran satu sentimeter;
- Vagina tampak keluar darah;
- Anus tampak terbuka.

Kesimpulan: kelaianan tersebut diakibatkan oleh diduga akibat pendarahan yang banyak akibat luka tusuk.

- Bahwa Terdakwa masih berusia 17 tahun.

Terhadap dakwaan yang disusun secara subsider bahwa sesuai dengan fakta persidangan yang terbukti adalah dakwaan pertama primer Pasal 340 KUHPidana :

Selanjutnya terdakwa dihukum dengan ketentuan pidana ini maka perbuatan terdakwa sebagaimana telah di uraikan dalam fakta hukum di atas harus memenuhi unsur-unsur berikut :

1) Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*", adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama Aliefka Dicky Pratama Alias Dicky Bin Arham sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Dengan demikian Unsur ini telah terbukti;

2) Unsur "Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu"

Menimbang bahwa Dengan Sengaja atau kesengajaan sering kali menjadi perdebatan dan polemik dikalangan para ahli dan praktisi hukum, karena *memorie vantoelichting* tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata dengan sengaja atau kesengajaan, sehingga kita hanya berpedoman dari adanya perbedaan antara *dolus* dan *culpa* dimana delik-delik culpa perbuatan dilakukan karena kealpaan sedangkan lawan dari kealpaan adalah kesengajaan ;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung dari berbagai yurisprudensinya memberikan batasan yang lebih jelas tentang kesengajaan yang bersumber dari sudut formil maupun materiil, sehingga “Dengan Sengaja” atau kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki ;

Menimbang bahwa dalam berbagai doktrin ilmu hukum, kata sengaja atau kesengajaan dapat ditinjau dari dua teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang

dikehendaki atas perbuatannya itu. Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa sedangkan dalam Teori pengetahuan, bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuatnya atau dilakukannya itu dapat menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang bahwa sengaja atau kesengajaan bisa dikaitkan dengan unsur kehendak (*Opzet*) yang bisa dibedakan dalam kehendak sebagai kesengajaan (*dolus*) dan kehendak sebagai kealpaan (*culpa*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*Direncanakan Terlebih dahulu*" dalam penjelasan pasal ini yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi sipembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, ditemukan fakta hukum, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa tidur berbaring-barang di rumah neneknya di Gempunge sambil memikirkan masalahnya dengan pacarnya yaitu korban Pr. MUNAH yang sampai sekarang belum menstruasi, sehingga keluarga korban Pr. MUNAH akan datang meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikahi korban Pr. MUNAH padahal keluarga Terdakwa tidak ingin terdakwa menikah dulu karena Terdakwa masih harus bersekolah dan dianggap belum bisa menafkahi korban Pr. MUNAH. Bahwa setelah memikirkan masalahnya yang harus diselesaikan sebelum awal bulan Mei, tiba-tiba Terdakwa teringat dengan badik yang disimpannya, kemudian Terdakwa mengambil badik tersebut dan berniat “mengeksesuksi” pacarnya tersebut. Terdakwa lalu menelpon saksi ALDI untuk menjemputnya di depan MTS Mangempang, sekitar pukul 09.45 saksi ALDI dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna merah hitam No.Pol DD 2803 LD datang menjemput Terdakwa di depan Mts Mangempang, pada saat itu Terdakwa sudah mengenakan sweter dengan penutup kepala dan kain skarf untuk menutup mukanya, setelah itu mereka berboncengan menuju Perpustakaan Daerah sebelumnya Terdakwa juga sudah

menghubungi saksi RAHMAT untuk datang ke Perpustakaan Daerah. Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi ALDI tiba di Perpustakaan Daerah, disana telah ada saksi RAHMAT, saksi AHMAD, dan saksi HERMAN yang duduk di Payung I, kemudian Terdakwa yang langsung duduk di Payung II memanggil saksi RAHMAT dan saksi HERMAN dan berkata “mauka eksekusi cewekku” lalu saksi HERMAN mengatakan “kenapako mau eksekusi cewekmu” lalu terdakwa mengatakan “nanti keluarganya datang meminta pertanggungjawaban karena sudah hamil, sudah saya tes dan hasilnya negatif, tapi sampai sekarang dia belum haid”, lalu saksi HERMAN mengatakan “janganmako eksekusi, gugurkanmi saja”, Terdakwapun diam, setelah itu mereka bertiga kembali ke payung I dan pada saat itu sudah ada saksi SANDI, setelah berkumpul di payung I Terdakwa kemudian mengeluarkan badiknya dan mengatakan kepada teman-temannya yang lain yaitu saksi RAHMAT, saksi AHMAD, saksi SANDI, saksi ALDI, dan saksi HERMAN “mauka eksekusi cewekku, badik ini harus merah!” setelah itu Terdakwa membungkus badik tersebut dengan kain skrafnya. Bahwa terdakwa kemudian meminta kepada teman-temannya tersebut untuk menjemput pacar terdakwa (korban Pr. MUNAH) akan tetapi tidak ada satupun saksi yang mau menjemput korban Pr. MUNAH, sehingga Terdakwa berboncengan dengan saksi ALDI pergi mencari orang lain yang mau menjemput korban Pr. MUNAH,

diperjalanan Terdakwa teringat temannya yaitu saksi ILHAM, maka Terdakwa dan saksi ALDI pergi ke rumah saksi ILHAM di Tempat Pelelangan Ikan Sumpang Binange, sesampai disana saksi ILHAM sedang tertidur dan Terdakwapun membangunkan saksi ILHAM dan mengatakan “pergiko dulu jemput cewek!”, setelah itu mereka berboncengan tiga pergi ke depan SMK Neg 1 Barru dan disana telah ada saksi RAHMAT, saksi AHMAD, saksi SANDI dan saksi HERMAN. Bahwa saksi ILHAM meminta kepada Terdakwa untuk diantar pulang karena saksi ILHAM belum mandi dan masih bau ikan, sehingga Terdakwa mengantar saksi ILHAM mandi dan setelah mandi mereka kembali ke depan SMK Neg 1 Barru. Bahwa dari SMK Neg 1 Barru Terdakwa dan saksi RAHMAT, saksi AHMAD, saksi SANDI, saksi HERMAN, saksi ALDI, dan saksi ILHAM pergi menuju ke Perpustakaan Daerah. Diperpustakaan Daerah Terdakwa menerima SMS dari korban Pr. MUNAH yang mengatakan korban sudah mau pulang sekolah, dan SMS itu dibalas oleh Terdakwa yang mengatakan tunggu di depan warnet Anime, nanti ada teman Terdakwa yang akan menjemput korban. Lalu Terdakwa menyuruh saksi ILHAM untuk menjemput korban Pr. MUNAH ke Lajulo dengan menggunakan motor milik saksi RAHMAT yaitu motor Yamaha Mio Soul No. Pol DD 3104 AK dan membawa helm saksi SANDI yaitu Helm GM merah hitam dengan kaca depan berwarna gelap ;

Bahwa setelah itu terdakwa yang dibonceng oleh saksi ALDI menunjukkan letak warnet Anime yang terletak di Jl. A.M. Akbar kepada saksi ILHAM dan pada saat itu korban Pr. MUNAH sudah berdiri menunggu di depan warnet tersebut, lalu saksi ILHAM menjemputnya dan memberikan helm milik saksi SANDI untuk dipakai oleh korban Pr. MUNAH, setelah itu mereka berangkat ke Lajulo. Bahwa diperjalanan tepatnya di depan SLB, Terdakwa yang berboncengan dengan saksi ALDI bertemu dengan saksi AHMAD yang berboncengan dengan saksi HERMAN, lalu Terdakwa memberi kode mereka dengan menganggukkan kepalanya agar mereka berdua ikut dengan Terdakwa. Bahwa terdakwa dan saksi ALDI kemudian singgah di Tuwung karena saksi ALDI takut dikenali oleh korban Pr. MUNAH maka saksi ALDI tidak ikut ke Lajulo dan menyimpan motornya di Tuwung, lalu Terdakwapun berpindah motor ke motor milik saksi HERMAN yaitu motor Yamaha Jupiter Z warna hitam No. Pol. DD 3968 LC. Kemudian Terdakwa berboncengan tiga dengan saksi AHMAD dan saksi HERMAN menuju ke Lajulo, akan tetapi di tengah perjalanan tepatnya di depan SMA Neg. 2 Unggulan Terdakwa bertemu dengan saksi ILHAM yang membonceng korban Pr. MUNAH, lalu Terdakwa menunjukkan jalan kepada saksi ILHAM untuk melewati jalan beton menuju Lajulo ;

Bahwa Terdakwapun tiba di Tempat kejadian perkara, Terdakwa lalu turun dari motornya dan turun kebawah bersembunyi di balik

semak-semak, sedangkan saksi AHMAD dan saksi HERMAN menunggu di atas di jalan beton . Bahwa saksi ILHAM yang membonceng korban Pr. MUNAH tiba pula di Tempat Kejadian, Terdakwa kemudian memanggil saksi ILHAM dan mengatakan “oe..oe..”, saksi ILHAM pun turun kebawah menemui Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh saksi ILHAM memanggil korban Pr. MUNAH, saksi ILHAM lalu mengatakan kepada korban Pr. MUNAH “dipanggilki”, selanjutnya korban turun kebawah dibalik semak-semak. Bahwa Terdakwa sempat naik ke atas jalan beton dan mengatakan kepada saksi AHMAD, saksi HERMAN, dan saksi ILHAM “tungguka sebentar”, lalu Terdakwa turun lagi kebawah, kemudian saksi HERMAN berteriak “Dicky.....Dicky.....janganmako anui.....hari Jumat ini”, lalu terdakwa mengatakan “kenapako panggilki namaku”, saksi HERMAN pun lalu menyuruh saksi ILHAM untuk memanggil korban Pr. MUNAH karena akan di tikam oleh Terdakwa, lalu saksi ILHAM memanggil korban Pr. MUNAH, akan tetapi korban Pr. MUNAH tetap berjalan mendekati Terdakwa, dan pada saat korban Pr. MUNAH berdiri di depan Terdakwa, Terdakwa lalu menghunuskan badiknya dan menikam bagian perut korban Pr. MUNAH sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa mencabut badiknya dari perut korban Pr. MUNAH, dan pada saat terdakwa mencabut badiknya, korban Pr. MUNAH memegang badik tersebut sehingga jari tangan telunjuk kanannya teriris dan hampir putus, lalu Terdakwa

menusukkannya lagi untuk kedua kalinya, pada saat itu korban Pr. MUNAH berbalik sehingga mengenai pinggang kanan korban Pr. MUNAH, kemudian korban Pr. MUNAH menunduk sambil berlutut lalu Terdakwa menusuk lagi di bagian punggung kirinya. Bahwa setelah menikam korban Pr. MUNAH Terdakwa naik ke atas jalan beton dan membunyikan motor yang dipakai saksi ILHAM kemudian Terdakwa dan saksi ILHAM berboncengan pergi ke rumah ibu kandung Terdakwa. Bahwa badik yang digunakan oleh Terdakwa untuk menikam korban Pr. MUNAH sudah Terdakwa buang ke sungai Jampue Barru. Bahwa Terdakwa pada saat itu memakai sweter dengan penutup kepala, kain skarf untuk menutup wajahnya, dan helm dengan kaca hitam dan Terdakwa mengenakan pakaian tersebut agar tidak dikenali oleh korban Pr. MUNAH ;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa pada saat di rumah nenek Terdakwa sambil berbaring-barang memikirkan bagaimana jalan keluar permasalahannya dengan korban Pr. MUNAH, lalu Terdakwa mengambil badiknya tersebut dengan maksud akan “mengeksekusi” korban Pr. MUNAH, dan niat tersebut disampaikan kepada teman-temannya yaitu saksi RAHMAT, saksi AHMAD, saksi SANDI, saksi ALDI, dan saksi HERMAN, dan Terdakwa telah menyusun rapih rencananya secara detil dengan memakai sweter dengan penutup kepala, skarf untuk menutup wajahnya, dan menggunakan helm

berwarna gelap dimana Terdakwa menggunakan semua perlengkapan tersebut agar tidak dikenali oleh korban Pr. MUNAH sehingga dapat menghilangkan jejaknya. Bahwa Terdakwa juga memilih tempat untuk mengeksekusi korban Pr. MUNAH di tempat yang sepi yang jarang dikunjungi orang yaitu di Lajulo dengan maksud agar ketika maksud perbuatannya itu dilaksanakan tidak ada orang lain yang melihatnya sehingga Terdakwapun bersembunyi di belakang semak-semak menunggu korban Pr. MUNAH, selain itu Terdakwa juga tidak menjemput sendiri korban Pr. MUNAH akan tetapi menyuruh orang lain menjemputnya yaitu saksi ILHAM agar korban Pr. MUNAH masih mengira Terdakwa masih dalam perjalanan dari Makassar ke Barru, dan Terdakwapun menghilangkan bukti berupa badik yang digunakan menikam korban Pr. MUNAH dengan cara membuang badik tersebut di sungai Jampue Barru, sehingga dari cara-cara atau perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu” telah terbukti atas diri Terdakwa;

Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

3) Unsur “Menghilangkan jiwa orang lain”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menghilangkan jiwa Orang lain” adalah suatu perbuatan yang menyebabkan kematian orang lain ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa telah menikam korban Pr. MUNAH dengan menggunakan sebilah badik pada bagian perut korban Pr. MUNAH sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa mencabut badiknya dari perut korban Pr. MUNAH, dan pada saat terdakwa mencabut badiknya, korban Pr. MUNAH memegang badik tersebut sehingga jari tangan telunjuk kanan korban Pr. MUNAH teriris dan hampir putus, lalu Terdakwa menusukkannya lagi untuk kedua kalinya, pada saat itu korban Pr. MUNAH berbalik sehingga mengenai pinggang kiri korban Pr. MUNAH, kemudian korban Pr. MUNAH menunduk sambil berlutut lalu Terdakwa menusuk lagi di bagian punggung kanannya, dimana perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban Pr. MUNAH meninggal dunia, hal ini diperkuat dengan adanya hasil Visum Et Repertum nomor : 285-RSUD-BR-IV-2012 atas nama SITTI MAEMUNA, tertanggal 27 April 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah Barru, Kab. Barru, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KHAERANOVIANTI Dokter pada RSUD Barru dengan hasil pemeriksaan :

- Tidak tampak lebam mayat, kaku mayat belum ada;

- Tampak mata terbuka, mulut terbuka;
- Luka lecet dibawah payudara kanan dengan ukuran kurang lebih dua kali nol koma lima sentimeter;
- Luka robek di pusar dengan ukuran kurang lebih dua kali satu sentimeter;
- Luka lecet pada lutut kanan;
- Luka-luka lecet di kaki kiri dengan ukuran lebih satu sentimeter;
- Luka tusuk punggung kiri dengan ukuran kurang lebih satu koma lima koma satu kali dua sentimeter dengan pendarahan aktif;
- Luka tusuk punggung bagian tengah dengan ukuran kurang lebih satu koma nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;
- Luka robek dipinggang kanan dengan ukuran kurang lebih tiga kali dua centimeter;
- Luka lecet di kepala bagian bawah belakang;
- Luka-luka lecet bagian tengkuk dengan ukuran satu sentimeter;
- Vagina tampak keluar darah;
- Anus tampak terbuka;

Kesimpulan : Kelainan tersebut diakibatkan oleh diduga akibat pendarahan yang banyak akibat luka tusuk;

Dengan demikian Unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Surat Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum telah terpenuhi serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan juga selama pemeriksaan berlangsung dari diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan baik pemaaf atau pembenar yang dapat dijadikan alasan untuk tidak menjadikan pidana kepadanya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa didalam pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta yang membuat Majelis Hakim ragu akan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa, relevansi terhadap adanya alasan pembenar maupun pemaaf dari diri terdakwa sehingga Majelis Hakim tidak meragukan sedikitpun akan kemampuan bertanggung-jawab dari Terdakwa;

Menimbang bahwa karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terhadap diri Terdakwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya karena tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf sebagaimana yang telah ditentukan dalam KUHP, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan Meyakinkan **Bersalah** melakukan tindak pidana **“Pembunuhan Berencana”**;

Menimbang bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengingat kualitas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Pengadilan haruslah memberikan keadilan yang dirasa cukup baik kepada Terdakwa maupun keluarga korban;
- Bahwa pidana penjara bukanlah berarti mengabaikan kepentingan terbaik anak, justru di dalam Lembaga Pemasyarakatan terutama ditempatkan di LP Anak diharapkan Terdakwa akan terdidik dan menjadi dewasa sebagaimana seharusnya dan Terdakwa akan menyadari setiap konsekuensi atas setiap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang bahwa oleh karena itu putusan yang diambil sebagaimana ditentukan dalam amar dianggap adil dan telah mempertimbangkan kepentingan terbaik anak ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan dipersidangan terhadap terdakwa dilakukan penahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan masa penahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti, maka statusnya akan ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Terhadap Dari fakta hukum diatas telah terbukti unsur-unsur delik yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum sepereti unsur barangsiapa, unsur sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dan unsur, menghilangkan nyawa orang lain.

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan penderitaan dan trauma yang dalam bagi keluarga korban, oleh

karena korban adalah anak satu-satunya dan merupakan harapan dari orang tuanya ;

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa seharusnya menjaga dan menyayangi korban oleh karena korban adalah pacar Terdakwa, dan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan semua perbuatannya atas diri korban, akan tetapi terdakwa melakukan perbuatan yang tergolong sadis yaitu membunuh korban ;
- Bahwa Terdakwa berusaha memanipulasi perbuatannya dengan merencanakan sedemikian rupa agar tanggungjawab perbuatan itu dibebankan pada teman-temannya ;
- Bahwa Terdakwa berusaha menghilangkan barang bukti yaitu badik dengan cara membuang badik tersebut di sungai Jampue;

b) Pertimbangan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Surat dakwaan menurut hukum acara pidana, seperti yang termuat dalam KUHAP jo Undang-undang No. 8 Tahun 1981 mempunyai peranan yang sangat penting, karena surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa dalam kedudukannya sebagai Penuntut Umum menjadi dasar pemeriksaan disidang pengadilan. Kemudian surat dakwaan itu menjadi pula dasar dari putusan hakim (Majelis Hakim). Betapa pentingnya surat dakwaan itu dapat terlihat dari bunyi pasal 197 KUHP, dalam hal putusan pembedaan, haruslah didasarkan kepada dakwaan

sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Sebagai konsekuensi logis dari sifat dan hakikat surat dakwaan digariskan dalam KUHAP seperti dikemukakan diatas, musyawarah-terakhir untuk mengambil keputusan Majelis Hakim wajib mendasarkannya kepada isi surat dakwaan (pasal 182 ayat 4 KUHAP).

Dari hal tersebut diatas jelas kiranya bahwa betapa pentingnya peranan yang dijalankan oleh surat dakwaan dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Surat dakwaan dengan demikian merupakan dasar hukum acara pidana, sehingga seorang terdakwa yang diajukan ke depan persidangan atas dakwaan melakukan suatu kejahatan, akan diperiksa, diadili dan diputus atas dasar surat dakwaan yang telah disusun secara terperinci dan jelas oleh Jaksa selaku Penuntut Umum dan bukan oleh hakim seperti halnya diatur dalam HIR sebelum berlakunya Undang-undang No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan RI.

Dalam pada itu, seperti halnya ditegaskan dalam Bab “memutuskan” dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mencabut “Het Herziene Inlandsch Reglement” Stbl Tahun 1941 No. 44 jo Undang-undang No. 1 Tahun 1951 L.N 1951 Nomor 9 “sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana”, sehingga atas dasar itu dalam tingkat banding,

Pengadilan Tinggi tidak lagi mempunyai kewenangan untuk mengubah atau merubah surat dakwaan, seperti ditentukan dalam pasal 14 dari Undang-undang Darurat diaksud tersebut tadi. Dalam kaitan ini MA dalam putusannya No. 589K/ Pid/1984 tanggal 17 Oktober 1984 menggariskan “Pengadilan Tinggi tidak berhak merubah dakwaan”.

Karena pentingnya surat dakwaan ini didalam pemeriksaan perkara sehingga walaupun terdakwa memang benar telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Jaksa, akan tetapi apabila ternyata perbuatan-perbuatan yang didakwa dalam surat dakwaan Jaksa adalah tidak sesuai atau tidak selaras dengan teks aslinya dari rumusan delik yang didakwakan telah dilanggar oleh terdakwa maka dakwaan itu harus dinyatakan “tidak dapat diterima dan terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan”.

Terdakwa dalam perkara pidana ini telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk subsider yaitu : **pertama primer : Pasal 340 KUHP, subsider : Pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 80 Ayat (3) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

c) Pertimbangan Laporan Penelitian LPA (Lembaga Perlindungan Anak)

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan M. GHUFRAN H. KORBI. K dari LPA (Lembaga Perlindungan Anak) Sulawesi Selatan, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan anak nakal yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang sangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana ;
- Bahwa penyelesaian/keadilan yang diharapkan selama ini tentang anak adalah keadilan restoratif yaitu suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan;
- Bahwa hasil dari penelitian yang dilakukan oleh M. GHUFRAN H. KORBI. K terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan diberbagai daerah di Indonesia maupun diluar negeri dapat diambil kesimpulan bahwa hal yang terbaik untuk kepentingan anak adalah tindakan pengembaian anak tersebut kepada orang tua/wali;
- Bahwa terhadap kejahatan tertentu yang dilakukan oleh anak yang masih dalam perdebatan tentang masalah pembedaan yang cocok buat Terdakwa.

terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1) Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan Non Yuridis dalam hal ini menyangkut pelaku, antara lain: pendidikan, posisi pelaku dalam keluarga, dan laporan dari petugas kemasyarakatan yang melihat latar belakang, sosialisasi, dan dampak lingkungan terhadap diri pelaku

Dari fakta yang penulis dapatkan dari Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan Terdakwa pada dasarnya adalah anak yang mempunyai potensi terbukti ketika masih kecil Terdakwa pernah menjadi Dai Cilik, akan tetapi karena pengaruh lingkungan terutama keluarga yang tidak dapat mendidik bahkan orang tua yang tidak dapat memberi teladan yang baik sehingga perkembangan mental maupun diri Terdakwa secara keseluruhan labil yang mengakibatkan sampai terjadinya pembunuhan Terhadap korban Pr. MUNAH.

Selain itu dari hasil dari penelitian yang dilakukan oleh M. Ghufuran H. Korbi. K terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan diberbagai daerah di Indonesia maupun diluar negeri dapat diambil kesimpulan bahwa hal yang terbaik untuk kepentingan anak adalah tindakan pengembalian anak tersebut kepada orang tua/wali;

2. Analisa Penulis

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana, di dalam putusan itu

hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan Pasal-pasal perbuatan hukum pidana dan pertimbangan Non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepadanya.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus dapat mengelola dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal ini bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan, serta tuntutan jaksa penuntut umum maupun muatan psikologis. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat didasari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, dan profesionalisme. Berkaitan dengan perkara yang penulis teliti, pada waktu melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Barru, penulis melakukan wawancara langsung kepada hakim yang memutus perkara ini, adapun hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Barru, mengatakan bahwa :

“Dalam pemeriksaan dan mengadili suatu perkara, hakim terikat dengan hukum acara, yang mengatur sejak memeriksa dan memutus. Dari hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil putusan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk di jadikan pertimbangan dalam suatu putusan. Sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan/menentukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting dan menentukan terhadap hasil putusan. Seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang hakim harus membuat keputusan-keputusan hakim yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya terjadi dalam masyarakat”.

Selanjutnya dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menetapkan anak nakal berumur 8 tahun tetapi belum 18 tahun dan belum pernah kawin, yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka hakim dapat menjatuhkan satu diantara kedua kemungkinan, ialah menjatuhkan pidana atau menjatuhkan tindakan. Dalam hal ini, terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pembunuhan dan diharapkan didepan persidangan berusia 17 tahun. Dalam salah satu pertimbangannya majelis hakim setelah membaca dan memperhatikan surat akta kelahiran dan kantor catatan sipil Kabupaten Barru dimana terdakwa lahir pada tanggal 27 Oktober 1995 maka usia terdakwa sekarang 17 tahun dan pada tanggal 27 Oktober 2012, nantinya berusia 18 tahun dan juga setelah melihat terdakwa secara fisik dan mental selama persidangan mak terdakwa sudah tepat apabila dijatuhi dengan hukuman penjara.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka penulis berpendapat bahwa Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut untuk sebahagian telah sesuai dengan teori hukum pemidanaan tetapi untuk bagian lainnya masih terdapat kelemahan yaitu dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi para terdakwa, tidak lazim dalam suatu putusan tidak mencantumkan pertimbangan menyangkut hal-hal yang meringankan terdakwa, dimana dalam perkara ini hanya hal-hal yang memberatkan yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Selain itu pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara pidana tersebut cukup berat mengingat terdakawanya adalah anak. akan lebih baik jika hakim menjatuhkan pidana sedikit lebih ringan disertai dengan lebih menekankan pada pemberian bimbingan atau pembinaan dan pelatihan sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut :

1. penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak, penerapan ketentuan pidana pada perkara ini yakni pasal 340 KUHP telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa di anggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam putusan nomor 40/Pid.sus/2012/PN.BR. telah sesuai, yakni dengan terpenuhinya semua unsur pasal dalam dakwaan yaitu dakwaan pertama Pasal 340 KUHP, serta keterangan saksi yang saling berkesesuaian ditambah keyakinan hakim. Selain itu hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi para terdakwa. Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut untuk sebahagian telah

sesuai dengan teori hukum pidana tetapi untuk bagian lainnya masih terdapat kelemahan yaitu dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi para terdakwa, tidak lazim dalam suatu putusan tidak mencantumkan pertimbangan menyangkut hal-hal yang meringankan terdakwa, dimana dalam perkara ini hanya hal-hal yang memberatkan yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Selain itu pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara pidana tersebut cukup berat mengingat terdakawanya adalah anak. akan lebih baik jika hakim menjatuhkan pidana sedikit lebih ringan disertai dengan lebih menekankan pada pemberian bimbingan atau pembinaan dan pelatihan sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

B. Saran

Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

1. Dengan jangka waktu pemeriksaan yang singkat, majelis hakim sepatutnya betul-betul mempertimbangan fakta-fakta yang terungkap di Pengadilan dan juga hati nuraninya, tidak hanya memprtimbangkan hal-hal yang memberatkan akan tetapi juga hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan betul-betul memberikan keadilan kepada terdakwa anak.

2. Pihak keluarga seharusnya menjadi benteng pencegahan pertama bagi anak agar tidak melakukan tindak pidana, karena kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang sangat vital dalam mendidik anak.
3. Penulis berharap agar pihak masyarakat dan pemerintah setempat bersedia menerima dan membantu mengawasi terdakwa ditengah-tengah kehidupan mereka setelah proses hukumnya selesai, dengan tujuan mencegah terdakwa yang telah dipidana agar iya tidak mengulangi lagi kejahatan pada umumnya dan perbuatan yang sama pada khususnya, sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat memperbaiki diri terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, 2010 *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Raja
Jakarta: Grafindo.

-----, 2011 *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan dan
Penyertaan*, Jakarta Raja :Grafindo Persada.

Amir Ilyas, 2011 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang
Education dan Pukap Indonesia.

-----, Dkk, 2012 *Asas-Asas Hukum Pidana 2*, Yogyakarta:
Rangkang Education dan Pukap Indonesia.

Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Anwar, 1994, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung :
Cipta Adya Bakti.

Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Barda Nawawi, 2011, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja
Grafindo.

Bunadi Hidayat, 2010 *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung:
Alumni.

Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika.

-----, 2011, *Proses Penanganan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika,

-----, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Maidin Gultom, 2010 *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama.

P.A.F., Lamintang, 2011 *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

-----, dan Theo Lamintang, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika.

R Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor : Politea.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum* Jakarta: Rineka Cipta.

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo.

Topo Santoso, Dan Eva Achani Zulfa, 2011 *Kriminologi*, Persada: Raja Grafindo.

Wirjono Prodjodikoro, 2010 *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Wigiati Soetodjo, 2011, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama,.

Walyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.

Yesmil Anwar, dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Bandung Refika: Aditama.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jakarta: PT. Pradnya Paramita

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan, Jakarta: Djambatan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Jakarta: Djambatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Ham, Jakarta: Asa Mandiri.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Putusan Mahkamah Konstitusi (Mk), Nomor: 1/Puu-Vii/2010, Tanggal 24 Februari 2011, Terhadap Pengadilan Anak.